Agama, Kerukunan, dan Binadamai di Indonesia

MODUL LOKAKARYA PENYULUH AGAMA

Tim PUSAD Paramadina

Agama, Kerukunan, dan Binadamai di Indonesia

MODUL LOKAKARYA PENYULUH AGAMA

Editor:
Husni Mubarok

Ali Nur Sahid • Dyah Ayu Kartika • Ihsan Ali-Fauzi
Husni Mubarok • Irsyad Rafsadie • Zainal Abidin Bagir

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina
Jakarta, 2018

Agama, Kerukunan, dan Binadamai di Indonesia
Modul Lokakarya Penyuluh Agama

Cetakan I, September 2018

Tim Penyusun
Ihsan Ali-Fauzi, Zainal Abidin Bagir
Irsyad Rafsadie, Husni Mubarok,
Dyah Ayu Kartika, Ali Nur Sahid

Perancang Sampul & Tata Letak: M. Agung Saputro

Penyunting: Husni Mubarok

Tata Bahasa: Saiful Rahman Barito & Nurul Agustina

Pengulas: Amirullah M.Ag (Dirjen Bimas Islam Kemenag RI)

Diterbitkan oleh
Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD)
Yayasan Wakaf Paramadina

Bekerja sama dengan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama RI

Atas dukungan
Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)
UIN Jakarta
United Nations Development Programme (UNDP)
melalui CONVEY

Alamat Penerbit:
Bona Indah Plaza Blok A2 No. B11
Jl. Karang Tengah Raya, Jakarta 12440
Telp. +62-815-11-666-075
http://paramadina-pusad.or.id

ISBN: 978-602-52519-1-7

Daftar Isi

Dari Penerbit

Tahun ini kita akan merayakan ulang tahun ke-20 atau dua dekade usia Reformasi di Indonesia, yang antara lain dicirikan oleh berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Seperti kita tahu, Reformasi kala itu kita maknai sebagai dipulihkannya kembali hak-hak sosial dan politik seluruh warganegara, salah satu ciri utama sistem politik demokrasi.

Dalam demokrasi, perbedaan pandangan dan kepentingan di antara warganegara tidak dikebiri atau dipasung, tapi dikelola sedemikian rupa sehingga semuanya bisa disalurkan dengan cara-cara damai. Agar berjalan dengan baik, demokrasi mensyaratkan peningkatan kapasitas negara dan masyarakat di dalam pengelolaan konflik ini, yang tumbuh akibat perbedaan pandangan dan kepentingan di atas.

Alhamdulilah, dalam usia yang masih tergolong muda, kinerja demokrasi di Indonesia tergolong makin baik. Konflik-konflik kekerasan komunal berskala besar, seperti yang terjadi di Poso atau Ambon di masa-masa awal Reformasi, sudah berhasil diatasi, meskipun sisa-sisanya masih terasa. Sementara itu, meskipun ancamannya tetap harus diwaspadai, kekerasan teroris makin bisa dinetralisasi, berkat meningkatnya kemampuan Polri dan kewaspadaan warganegara pada umumnya.

Dari segi ini, Indonesia kini menjadi kebanggaan dunia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia (sesudah

Amerika Serikat dan India) dan demokrasi dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kita wajib bersyukur atas capaian ini, mengingat begitu luasnya negeri kita dan begitu besar dan beragamnya penduduk yang mendiami negeri ini dari segi agama, suku dan bahasa.

Di tengah-tengah keberhasilan tersebut, salah satu tantangan yang masih terus menghantui demokrasi kita adalah berbagai konflik berlatar belakang agama yang disertai aksi-aksi kekerasan. Hal ini berlangsung di antara berbagai kelompok atau sekte dalam satu agama yang sama (sektarian atau intra-agama), di antara berbagai kelompok dalam agama-agama yang berbeda (komunal atau antar-agama), atau di antara pemeluk agama tertentu dengan penganut aliran kepercayaan atau agama leluhur tertentu.

Di antara pihak yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk turut mengawasi dan mengatasi intoleransi, radikalisme dan ekstremisme kekerasan adalah penyuluh agama. Penyuluh agama strategis karena mereka bekerja di tingkat paling bawah, desa/kelurahan. Mereka menjangkau majelis-majelis taklim, perkumpulan, komunitas agama di masyarakat untuk menyebarkan model usaha binadamai dan nirkekerasan dalam rangka mengantisipasi radikalisme dan ekstremisme di masyarakat.

Modul ini disusun oleh tim yang dibentuk oleh PUSAD Paramadina. Pada prosesnya, modul ini melibatkan beberapa pihak, seperti Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, peneliti Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM, dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, untuk turut mempertajam isi yang sesuai dengan target pembacanya. Seperti diketahui, pembaca modul ini pada mulanya adalah penyuluh agama. Meski demikian, modul ini kami harapkan bisa dibaca oleh masyarakat lebih luas.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada the United Nations Development Programme (UNDP) dan Pusat

Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta yang telah mendukung penyusunan panduan ini melalui CONVEY.

Jakarta, 7 September 2018

Ihsan Ali-Fauzi

Pendahuluan

Di usianya yang ke-20, demokrasi di Indonesia telah mencapai beberapa kemajuan sekaligus menghadapi sejumlah tantangan, baik di pemerintah maupun di masyarakat. Di antara kemajuan yang telah dicapai demokrasi di Indonesia adalah jaminan negara terhadap kebebasan berekspresi, beragama, berorganisasi, berkebudayaan, dan berpolitik melalui perubahan konstitusi. Negara menjamin tidak akan mengintimidasi lagi pilihan politik, kegiatan sosial, dan perilaku di masyarakat selagi tidak bertentangan dengan hukum. Janji ini bisa ditemukan pada konstitusi hasil amandemen 1999-2001 Indonesia yang memasukkan pasal 28 a-j tentang hak asasi manusia dan pada UU tentang khusus HAM yang disahkan 1999.

Kemajuan lain adalah dalam menangani polemik dan perseteruan di masyarakat, pemerintah cenderung menggunakan pendekatan sipil yang mengedepankan dialog dan mediasi, yang mana penegakan hukum menjadi jalan terakhir. Setelah kepolisian terpisah dari TNI dan diberi kewenangan lebih besar untuk menangani masalah sosial masyarakat, polisi mengedepankan pendekatan *preemtif* (upaya-upaya awal yang dilakukan pihak berwajib untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kekerasan, termasuk penyadaran kepada masyarakat) dan *preventif* (tindak lanjut dari upaya preemptif, yakni menghalau aksi massa yang telah diketahui berpotensi melakukan tindakan melawan hukum. Contohnya polisi mengalihkan lalu lintas sebuah aksi massa dengan maksud mencegah terjadinya kekerasan). Meski dua

pendekatan ini tidak selamanya mulus dan berhasil, semangat menangani dengan jalan pencegahan dini adalah satu kemajuan dibanding dengan rezim otoriter.

Sejak 2006, pemerintah Indonesia juga telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, yang diberi kewenangan untuk memfasilitasi dialog, menerima dan menyalurkan aspirasi, menyebarluaskan kebijakan pemerintah, dan merekomendasikan pendirian rumah ibadah. Meski belum tampak hasilnya, forum ini menjadi bukti bahwa mekanisme nirkekerasan adalah jalan yang cenderung ditempuh pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan persoalan.

Dari segi politik, penduduk Indonesia juga bebas bergabung dengan partai politik mana pun. Mereka bahkan bebas mengutarakan ketidaksetujuan kepada pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung. Kadangkala, kebebasan menyatakan pendapat ini menimbulkan polemik jika menyangkut isu dan masalah kontroversial di masyarakat. Kontroversi dan polemik selagi tidak disertai intimidasi pada dasarnya adalah ciri khas demokrasi, yang harus dipelihara selama disalurkan dan diselesaikan dengan cara nirkekerasan.

Secara umum, dalam dua puluh tahun terakhir, cara masyarakat Indonesia menyelesaikan kontroversi, polemik, dan perseteruan cenderung berubah dari kekerasan ke nirkekerasan. Menurut data PUSAD Paramadina, hingga 2005 masyarakat lebih banyak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah dan konflik. Sementara itu, sejak 2008 sebagian besar masyarakat di Manado dan Kupang menemukan cara mengatasinya dengan nirkekerasan. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia lebih cenderung menyuarakan ketidaksetujuan dengan nirkekerasan.

Meski kecil, kekerasan tetaplah kekerasan yang akan merusak bangunan demokrasi. Serangan terorisme salah satunya belum

sepenuhnya sirna meski aparat telah membongkar jaringan pada tingkat nasional sejak 2004. Alih-alih sirna, jaringan teroris kecil-kecil seperti sel terus berkembang biak dan menebar teror. Dalam beberapa kasus, mereka mulai berani merakit bom dan meledakkannya sendiri. Serangan terakhir di Surabaya, misalnya, menandai modus baru di mana aksi teror melibatkan perempuan dan anak-anak, fenomena yang tidak terbayangkan sebelumnya (IPAC, 2018).

Konflik antar-komunitas seagama juga merupakan tantangan lain bagi demokrasi. Konflik ini bahkan belakangan telah menelan korban jiwa, yang belum pernah ada presedennya. Hal ini terjadi pada 2011 dan 2012, ketika konflik kekerasan anti-Syiah dan anti-Ahmadiyah menelan korban jiwa dan terusirnya satu kelompok komunitas dari tempat tinggal mereka menjadikan mereka pengungsi internal (Panggabean dan Ali-Fauzi, 2014). Selain korban jiwa, beberapa insiden terakhir juga mengakibatkan kerusakan properti seperti bangunan dan harta benda lainnya. Misalnya, yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada 2016 (Rafsadi, Mulyartono, dan Nur Sahid, 2017).

Hal lain yang juga patut diwaspadai adalah tahun politik, yang memicu memelintir sedemikian rupa ujaran kebencian berbasis agama atau etnis demi kepentingan politik. Kita ingat bagaimana Pilpres 2014 dan Pilkada Jakarta 2017 diwarnai masifnya penggunaan ujaran dan hasutan kebencian yang diyakini banyak ahli telah mengakibatkan terkoyaknya solidaritas anak bangsa dan meningkatnya intoleransi (Hamid, 2018; Hadiz, 2018).

Semua perkembangan di atas seperti mengukuhkan data-data survei terbaru mengenai radikalisme dan ekstremisme kekerasan, yang membuat kita khawatir. Survei The Wahid Institute & LSI (2017) menemukan bahwa 11 juta dari 150 juta penduduk Muslim di Indonesia siap melakukan tindakan radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Sementara itu, di kalangan anak-anak muda, dalam hal ini anak didik di sekolah,

penelitian PPIM (2017) menunjukkan kekhawatiran serupa, yakni 23,3 persen siswa dan siswi menyatakan setuju bahwa bom bunuh diri merupakan implementasi tertinggi jihad.

Survei lain menunjukkan temuan serupa. Alvaro Research Center dan Mata Air Foundation (2017) menemukan bahwa pengajaran intoleransi telah menyasar kelompok masyarakat elit dan kelas menengah di Indonesia. Menurut survei ini, sekitar 29,6 persen responden menyatakan setuju memperjuangkan negara Islam dan perlunya menerapkan syariat Islam secara *kaffah* atau menyeluruh di Indonesia.

Upaya-upaya apa saja yang masih harus dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan di atas? Siapa saja agen-agen yang mungkin punya peran penting dan perlu didukung lebih jauh?

Di antara aktor yang potensial memainkan peran strategis untuk membenahi masalah-masalah di atas adalah para penyuluh agama. Menurut Surat Keputusan Menteri Agama No. 79 tahun 1985, para penyuluh agama bertugas mengembangkan mental, moral, dan nilai di masyarakat serta mendorong peningkatan kualitas hidup dalam berbagai segi, termasuk agama dan pembangunan nasional. Hingga 2014, tercatat ada 4.762 penyuluh agama PNS dan 102.132 penyuluh agama non-PNS. Dari jumlah itu, setiap kecamatan memiliki seorang penyuluh agama PNS dan beberapa penyuluh agama non-PNS di Indonesia.

Persoalannya, sementara kita mengharapkan penyuluh agama berkontribusi menangkal radikalisme dan ekstremisme kekerasan, mereka jarang mendapat kesempatan untuk memperkuat kapasitas, sumber daya dan posisi strategis yang mereka miliki. Kementerian Agama sebetulnya telah memiliki aplikasi berupa Elektronik Penyuluh Agama Islam (E-PAI) sebagai alat untuk menilai kinerja para penyuluh agama. Sayangnya, alat ukur ini tidak banyak membantu untuk menilai sejauh mana kinerja penyuluh agama dalam menjalankan tugas

dan fungsinya. Untuk itu, tahun lalu BNPT dan Kementerian Agama memberikan pelatihan kepada 200 penyuluh agama di Indonesia (*Republika*, 2018).

Untuk turut andil memperkuat penyuluh agama, kami merancang kegiatan lokakarya bersama ratusan penyuluh agama di 9 (sembilan) provinsi di Indonesia. Lokakarya tersebut kami harapkan menjadi sarana bertukar pikiran antara penyuluh agama dengan narasumber dalam memelihara binadamai dan merespons intoleransi dan potensi ekstremisme kekerasan di masyarakat dengan cara nirkekerasan. Lebih jauh, kami mengharapkan pengetahuan yang dihasilkan lokakarya akan ditularkan ke komunitas di mana para penyuluh agama bertugas. Dengan demikian, literasi agama tentang binadamai dalam rangka mencegah ekstremisme kekerasan menjadi akan agenda bersama seluruh komponen masyarakat di Indonesia.

Modul yang ada di tangan pembaca ini adalah bahan bacaan untuk lokakarya bagi penyuluh agama di Indonesia. Modul ini berfungsi sebagai pemantik diskusi antara peserta, narasumber, dan fasilitator. Bahan bacaan ini sangat mungkin diperkaya oleh pengalaman peserta yang sehari-hari bergumul dengan isu kerukunan dan ekstremisme di masyarakat. Di sisi lain, peserta diharapkan akan memperoleh perspektif baru dalam memahami dan mengartikulasikan persoalan di masyarakat secara jelas sehingga mampu merumuskan cara merespons persoalan secara strategis dan dengan cara nirkekerasan.

Modul ini terdiri dari lima bab: tiga di antaranya berisi pengetahuan dan dua bab lainnya lebih menekankan pada keterampilan. Setelah pendahuluan, bab pertama modul ini mendiskusikan tentang wawasan kebangsaan dan agama di Indonesia. Tujuan pembelajaran bab ini adalah agar peserta lokakarya memahami dengan jernih apa beda antara negara dan bangsa, bagaimana hubungan agama dan negara, bagaimana nasionalisme terbentuk, apa saja sumbangsih Islam dalam rangka pembentukan nasionalisme, dan apa saja dukungan

dari agama lain terhadap pembangunan bangsa Indonesia yang beragam ini. Pemahaman tentang wawasan kebangsaan ini diharapkan menjadi bekal dalam menghadapi orang yang mempersoalkan nasionalisme dalam kaitan dengan posisi agama dan kebangsaan di masyarakat.

Bab dua modul ini memetakan intoleransi dan ekstremisme keagamaan di Indonesia. Merujuk pada data-data yang tersedia, pemetaan ini akan memberi gambaran nasional perihal apa saja yang biasanya menjadi pemicu intoleransi, bagaimana jenis dan bentuknya, dan akibatnya terhadap kehidupan keagamaan di Indonesia. Selain peta "buruk", bab ini juga menunjukkan wajah Indonesia yang lebih optimis dengan menyajikan praktik-praktik toleransi dan binadamai di masyarakat. Selain menambah wawasan, pemetaan ini juga diharapkan menjadi model bagi penyuluh agama dalam memetakan persoalan yang ada di wilayah tugas mereka.

Pada bab tiga, modul ini akan mendiskusikan agama dan binadamai. Agama seringkali dihubungkan dengan kekerasan, terlebih setelah serangan terorisme di Amerika Serikat pada 2001 dan serangan teror lain di berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam merespons stigma media barat bahwa 'agama adalah sumber terorisme', para pemuka agama cenderung mencari-cari dalil-dalil agama yang mengecam tindakan terorisme. Padahal yang diperlukan adalah menunjukkan dimensi dari agama yang mengandung nilai dan landasan bagi nirkekerasan dan binadamai, yang menunjukkan agama tidak pasif, melainkan secara aktif turut andil dalam mendorong perubahan di masyarakat. Bab ini bertujuan membekali penyuluh agama di Indonesia mengaktifkan sumbangsih agama untuk perubahan sosial tanpa kekerasan.

Setelah aspek pengetahuan pada tiga bab pertama, bab empat mengetengahkan dimensi keterampilan berupa kemampuan menganalisis ketegangan, perseteruan, dan konflik di masyarakat. Keterampilan tersebut terdiri dari cara-cara

membedakan konflik dan kekerasan, mengenali tahapan konflik dari rumor hingga fase kekerasan, mengidentifikasi posisi, kepentingan, dan kebutuhan aktor-aktor yang terlibat. Berbekal alat analisis tersebut, penyuluh agama diharapkan mampu mengidentifikasi perselisihan yang terjadi di wilayahnya secara tepat, jernih, dan memadai. Dengan demikian, para penyuluh agama menjadi pihak yang menyediakan data akurat kepada pemangku kepentingan lain yang hendak menyelesaikan perselisihan itu secara nirkekerasan.

Bab terakhir modul ini mendiskusikan tentang perangkat untuk membuat kontra narasi terhadap propaganda intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan di media sosial. Perangkat tersebut terdiri dari bagaimana mengenali hoaks dan ujaran kebencian, bagaimana mengembangkan narasi alternatif yang berorientasi pada nirkekerasan dan binadamai, dan langkah-langkah praktis di media sosial. Perangkat dan keterampilan tersebut diharapkan dapat membantu penyuluh agama menetralisasi rumor dan berita bohong yang beredar di masyarakat, selain menyediakan model-model narasi yang mengedepankan nirkekerasan dan binadamai.

Lima bab modul ini akan didiskusikan dalam delapan sesi (dua hari) lokakarya, dan tiga sesi sisanya dimanfaatkan untuk diskusi kelompok mendalami materi, kerja kelompok mempraktikkan analisis konflik, dan uji coba kampanye langsung menangkal rumor dan ujaran kebencian di media sosial. Peserta lokakarya, dengan demikian, diharapkan kembali ke wilayah masing-masing membawa pemahaman yang jernih mengenai agama, kebangsaan, nirkekerasan, dan binadamai, serta keterampilan menganalisis dan menghalau rumor pemicu konflik. Dengan demikian, kami berharap kita semua bisa mengatasi propaganda kebencian dan menghindari kekerasan sejak dini. Selamat membaca.***

Bab I
Agama dan Kebangsaan di Indonesia

Garis besar bab ini:

- Mengenali beda antara negara dan bangsa.
- Bagaimana hubungan agama dan negara yang saling mengisi satu sama lain.
- Nasionalisme sebagai modal pertahanan diri bangsa dari kemungkinan pecahnya konflik dengan kekerasan dalam rangka pembangunan-bangsa.
- Dukungan agama-agama terhadap nasionalisme di Indonesia.

Tiap orang memiliki beragam identitas. Misalnya, mantan Presiden Abdurrahman Wahid adalah seorang Muslim, berasal dari suku Jawa, kelahiran Jombang, dan bekerja sebagai pemimpin pesantren, sebelum terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat.

Dalam pergaulan internasional sekarang, tiap orang akan dikenali menurut paspor negara apa yang dibawanya. Paspor

itu juga menunjukkan negara asal dan kebangsaannya. Itulah yang membedakan mantan Presiden Abdurrahman Wahid dari, misalnya, mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush.

Tetapi apa itu yang disebut negara? Apa perbedaannya dari dan hubungannya dengan bangsa? Apakah identitas kebangsaan seseorang harus bertentangan dengan identitas keagamaannya?

Negara dan Bangsa

Bangsa (*nation*) mengacu kepada sekelompok orang yang memiliki identitas kebangsaan yang sama. Identitas bersama itu bisa dibangun berdasarkan kesamaan bahasa, sejarah, budaya, atau sekadar karena fakta bahwa sekelompok orang itu menempati wilayah yang sama.

Hal ini berbeda dari negara (*state*), yang mengacu kepada batas-batas wilayah di mana sebuah bangsa berada. Dengan kata lain, negara adalah sebuah unit politik dan administratif yang independen, dengan batas-batas yang relatif jelas, yang berhasil mendapatkan pengakuan akan loyalitas dari penduduk yang kemudian menjadi warganegaranya.

Dalam beberapa kasus seperti Jepang dan Swedia, ada korespondensi antara keanggotaan dalam sebuah bangsa dan keanggotaan dalam sebuah negara. Kasus-kasus seperti ini disebut sebagai "negara-bangsa" (*nation-state*), di mana bangsa identik dengan negara.

Dewasa ini, kita cenderung melihat fenomena di atas sebagai sesuatu yang lumrah. Tapi sebenarnya ada beberapa variasi yang penting dicatat:

- Sebagian negara di dunia didiami bangsa atau suku-bangsa yang beragam (misalnya Kanada atau

bekas Uni Soviet). Bangsa-bangsa itu sebenarnya bersifat multi-bangsa, atau multinational. Indonesia juga demikian.

- Sebaliknya, ada bangsa yang lebih besar dari negara aktualnya, seperti bangsa Jerman atau China. Demikianlah, misalnya, kita dapat menemukan bahwa orang-orang China ada di mana-mana, dari New York di Amerika Serikat hingga Tangerang di Indonesia.

- Selain itu, ada bangsa yang sama, yang terbelah ke dalam dua atau lebih negara, karena alasan-alasan politik tertentu. Misalnya adalah bangsa Korea dewasa ini, yang terpecah ke dalam Korea Selatan dan Korea Utara.

- Beberapa kelompok manusia yang mengklaim diri sebagai bangsa pada kenyataannya tidak memiliki negara sama sekali. Mereka disebut "bangsa tanpa negara" (*stateless nations*). Contohnya bangsa Kurdi hingga sekarang.

Dalam kasus-kasus yang terakhir disebutkan, bangsa dan negara tidak berjalan seiring. Hal itu bisa menimbulkan konflik-konflik politik yang berdarah-darah, tapi bisa juga menjadi sumber keragaman yang saling memperkaya.

Negara dan Agama

Negara-negara juga bisa dibedakan dari ciri khas agama yang dianut para penduduknya dan dalam peran agama di dunia politik. Ada beragam pola besar di sini, di antaranya:

- Negara-negara di mana agama tertentu menjadi basis identitas nasional sebagian besar penduduknya. Di negara-negara ini, agama tertentu biasanya menjadi agama resmi negara (misalnya Islam di Pakistan atau Kristen di negara-negara Skandinavia).

- Negara-negara di mana agama tertentu menjadi basis identitas kebangsaan dan disebut negara agama. Di negara-negara ini, para pemimpin agama terlibat langsung sebagai pemimpin politik, seperti kita saksikan di Iran sesudah Revolusi Islam (1979).

- Pada tingkat dan bentuk yang berbeda, hampir semua negara di dunia menerapkan prinsip sekularisme. Secara ringkas, sekularisme adalah prinsip *pemisahan* antara agama dan politik, di mana dinding sengaja dibangun di antara keduanya, agar urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Maksudnya adalah agar agama apa pun tidak diistimewakan atau dianaktirikan oleh pemerintahan. Sekularisme adalah prinsip bernegara yang bersikap *netral* dalam urusan-urusan agama.

- Tergantung kepada pengalaman sejarahnya masing-masing, negara-negara sekular tertentu bisa dikelompokkan ke dalam (1) negara-negara sekular yang bersahabat dengan agama, dan (2) negara-negara sekular yang kurang atau tidak bersahabat dengan agama. Contoh yang pertama adalah Amerika Serikat, yang bahkan mata uangnya ditandai motto *"In God We Trust"*. Sementara itu, contoh negara sekular kedua adalah Perancis, di mana penampakan identitas keagamaan apa pun di ruang publik tidak diizinkan.

Nasionalisme dan Pembangunan-Bangsa

Di negara-negara yang baru merdeka, rasa nasionalisme rakyat masih harus terus ditumbuhkan. Bahkan, salah satu tantangan paling berat negara-negara baru adalah upaya "pembangunan bangsa" (*nation building*), yaitu proses dengan apa semua penduduk di wilayah tertentu *mengidentifikasikan diri* dengan simbol-simbol dan institusi-institusi negara dan merasa senasib sepenanggungan terlepas dari apa pun latar belakang etnis dan agama mereka.

Pembangunan bangsa bukanlah pekerjaan mudah. Jika rasa nasionalisme tidak dimiliki bersama oleh rakyat di suatu negara, kita bisa membayangkan kemungkinan merebaknya konflik-konflik kekerasan yang disulut oleh identitas etnis atau agama di negara itu. Perang-perang saudara antara para nasionalis Nigeria dan kaum separatis Biafra pada 1960-an adalah contoh yang terkenal mengenai bagaimana loyalitas kebangsaan bertabrakan dengan loyalitas etnis.

Nasionalisme dan Islam di Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara paling majemuk di dunia dilihat dari segi asal-usul etnis dan agama para pemeluknya. Indonesia juga sebuah bangsa yang memperoleh kemerdekaannya belum lama.

Bagaimana agama-agama berhubungan dengan nasionalisme Indonesia? Hubungan itu umumnya integratif meskipun kadang muncul ketegangan. Ini tampak dari dukungan umat Islam, Kristen dan Katolik terhadap nasionalisme Indonesia.

Di era kolonialisme Belanda, kaum Muslim umumnya menopang nasionalisme Indonesia. Hal ini bahkan diakui oleh para sarjana asing. George Kahin, peneliti terkenal dari Universitas Cornell, misalnya, menyatakan bahwa Islam "bukan saja merupakan mata rantai yang mengikat persatuan, melainkan juga menjadi simbol kesamaan nasib di dalam menentang penjajah asing."

Pada awal periode pergerakan, salah satu perwujudan politik Islam adalah Sarekat Islam (SI). Organisasi yang didirikan H. Samanhoedi (1868-1956) di Solo pada 1911 ini belakangan berkembang pesat sebagai organisasi politik nasional pertama di Hindia Belanda, khususnya di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto (1882-1934). Seperti dikatakan Ruth McVey, Indonesianis kenamaan lainnya, "SI adalah pusat kebangkitan nasional Indonesia."

Namun, menjelang dan di awal era kemerdekaan, ketegangan sempat muncul antara Islam dan nasionalisme. Ini tercermin dalam perdebatan mengenai dasar negara pada 1930-an. Sementara "kelompok Islam" mendesak agar negara merdeka nantinya didasarkan atas Islam, "kelompok kebangsaan" menolak pandangan ini, karena hal itu akan memecah persatuan Indonesia.

Perdebatan ini berlanjut pada masa pendudukan Jepang di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Diputuskan bahwa landasan sementara bagi Republik Indonesia adalah Pancasila, dengan sila pertama berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa." Juga disepakati bahwa perdebatan akan dibuka kembali ketika kemerdekaan telah dicapai.

Perdebatan ini muncul kembali dalam sidang-sidang Majelis Konstituante hasil Pemilu 1955. Para wakil kelompok Islam berpendapat bahwa negara harus didasarkan atas Islam dan bukan Pancasila. Namun, kelompok nasionalis dan non-Muslim tidak menyetujui usulan tersebut. Perdebatan ini pun menemui jalan buntu.

Penting dicatat bahwa dalam perdebatan di atas, Presiden Sukarno (1901-1970) dan Wakil Presiden Muhammad Hatta (1902-1980), yang juga Muslim, termasuk dalam kelompok nasionalis yang menolak usulan Islam sebagai dasar negara. Keduanya juga berusaha untuk meyakinkan para pemimpin partai Islam bahwa Pancasila itu sendiri adalah sesuatu yang Islami.

Ketegangan antara nasionalisme dan Islam di Indonesia baru mencair pada 1970-an, terutama berkat sumbangan pemikiran Nurcholish Madjid (1939-2005), intelektual yang secara formal mendapat pendidikan Islam dan diakui otoritasnya. Dia menyatakan bahwa sekularisasi politik, dalam arti pemisahan antara urusan negara dan urusan agama, adalah sesuatu yang Islami. Dia menyebut Pancasila sebagai kesepakatan bersama

(*kalimah sawa'*) semua anak negeri di Indonesia, terlepas dari agama mereka apa.

Pandangan di atas didukung Abdurrahman Wahid (1940-2009), mantan Ketua PBNU dan Presiden Republik Indonesia keempat. Dia menyatakan, untuk membangun negara modern dan demi kepentingan umum, agama tertentu tidak boleh dianggap berkedudukan lebih tinggi dibanding agama-agama lain. Di bawah kepemimpinannya, NU merupakan organisasi Islam pertama yang menerima Pancasila sebagai ideologi final dan satu-satunya asas bagi Republik Indonesia.

Kyai Ahmad Siddiq (1926-1991), seorang ulama NU kharismatis, memperkuat pemikiran di atas dari jurusan lain. Dia menyatakan bahwa selain *ukhuwwah Islamiyah* (persaudaraan sesama Muslim), Islam juga mengajarkan *ukhuwwah wathaniyah* (persauaraan sesama tanah air) dan *ukhuwwah basyariyyah* (persaudaraan sesama manusia). Ketiga jenis persaudaraan ini harus berhubungan secara harmonis dan seimbang. Menurutnya, hanya melalui tiga jenis persaudaraan inilah cita-cita Islam sebagai *rahmatan li al-'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) dapat diwujudkan. Atas dasar pertimbangan ini, kaum Muslim di Indonesia berkewajiban menerima Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa yang terdiri dari kelompok-kelompok agama yang berbeda.

Dukungan Agama-agama lain

Sementara itu, berdirinya Indonesia sebagai negara-bangsa juga hasil perjuangan umat-umat beragama lain, termasuk umat Kristen. Menurut mereka, keyakinan teologis Kristen mempersaksikan bahwa Allah menentang penjajahan dan eksploitasi. Salah satu contoh tokoh nasionalis Kristen yang turut mendukung dan memperkokoh nasionalisme Indonesia adalah Dr. Johannes Leimena (1905-1977). Selain ikut dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, dia merupakan satu-satunya tokoh politik yang pernah menjabat sebagai menteri

sepanjang 21 tahun berturut-turut di dalam 18 kabinet yang berbeda. Karenanya, terkenal ungkapan: "Pemimpin kabinet pemerintahan boleh berganti, tetapi Leimena selalu menjadi anggota kabinetnya."

Dalam konteks pembangunan rasa keindonesiaan, beberapa tokoh nasionalis Kristen juga ikut memainkan peran penting. Satu tokoh yang harus disebutkan di sini adalah Tahi Bonar Simatupang atau T.B. Simatupang (1920-1990), seorang jenderal purnawirawan yang pernah ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia (KASAP) setelah Panglima Besar Jenderal Soedirman wafat pada 1950. Sebagai tokoh ekumenis Indonesia, dia dikenal antara lain berkat tetra kata – yakni konstruktif, kreatif, realistis, dan kritis – yang mencerminkan pendekatan di dalam keterlibatan umat Kristen di Indinesia. Melalui tetra kata itu, dia mengajak gereja-gereja di Indonesia untuk melihat dan mengusahakan umat Kristen di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam terang Injil Kerajaan Allah.

Sementara itu, salah satu tokoh yang mendukung peran umat katolik dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah Uskup Agung Semarang, Mgr. Soegijapranata, SJ (1896-1963). Dia memindahkan pusat Gereja Katolik dari Semarang ke Yogyakarta sehingga memudahkan komunikasinya dengan pimpinan Republik Indonesia yang saat itu juga beribukota di Yogyakarta. Selanjutnya, beliau menghimbau anak-anak muda Katolik untuk pergi berjuang mempertahankan negaranya dan berkata "baru boleh pulang kalau kau mati." Dukungannya juga terlihat dalam upayanya menjembatani pemerintah Indonesia dengan Gereja Katolik di Vatikan. Upayanya ini membuahkan hasil bahwa Vatikan menjadi salah satu negara Eropa yang pertama mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia.

Salah satu motto yang diperkenalkan Mgr. Soegijapranata dan masih diingat oleh umat Katolik hari ini adalah "100% Katolik, 100% Indonesia". Motto ini pertama kali muncul ketika

dia membuka Kongres Katolik di Semarang. Dia menyatakan: "Jika kita merasa sebagai orang Kristen yang baik, kita semestinya juga menjadi seorang patriot yang baik. Karenanya, kita merasa bahwa kita 100% patriotik sebab kita juga merasa 100% Katolik. Malahan, menurut perintah keempat dari Sepuluh Perintah Allah, sebagaimana tertulis dalam Katekismus, kita harus mengasihi Gereja Katolik, dan dengan demikian juga mengasihi negara, dengan segenap hati."***

Bab II
Tantangan-tantangan Utama dalam Kehidupan Keagamaan Kita

Garis besar bab ini:

- Peta tantangan dalam kehidupan keagamaan setelah 20 tahun Reformasi.
- Memperlihatkan tantangan yang muncul dari perdebatan di ranah hukum; konflik antaragama, intra agama, dan terorisme; politisasi agama; simbol keagamaan yang makin menonjol dalam kehidupan sehari-hari.
- Gambaran tentang bagaimana merespons tantangan tersebut.

Belakangan ini beragam istilah dipakai untuk menggambarkan kekhawatiran akan adanya tantangan-tantangan besar dalam kehidupan keagamaan kita. Misalnya, "intoleransi", "ekstremisme", "radikalisme", "fundamentalisme", "konservatifisme", dan sebagainya. Tidak selalu mudah memastikan makna dan ketepatan penggunaan istilah-istilah tersebut; apalagi karena penggunaan istilah-istilah itu tidak selalu dapat dipisahkan dari kepentingan politik.

Istilah-istilah itu menyuarakan kekhawatiran, dan sekaligus mengasumsikan suatu cita-cita tentang masyarakat, kehidupan kebangsaan, dan keagamaan yang baik. Cita-cita itu bisa digambarkan dengan beberapa kata sentral seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, kerukunan, perdamaian, atau kesetaraan. Namun kita tahu juga bahwa sementara ada kesepakatan mengenai pentingnya konsep yang digambarkan oleh kata-kata tersebut, nyatanya keragaman tafsir di sini pun tidak dapat dielakkan.

Untuk itu, yang ingin dilakukan pertama kali dalam bab ini, adalah memberikan gambaran yang agak luas dimana kita dapat menempatkan dengan lebih cermat persoalan-persoalan yang menjadi tantangan Indonesia hari-hari ini.

20 Tahun Setelah Demokrasi: Memetakan Persoalan

Pentingnya agama dalam kehidupan publik Indonesia adalah kenyataan yang sudah diakui banyak sarjana pengkaji Indonesia. Sejak awal sejarah Indonesia merdeka, melewati periode-periode politik yang berbeda, perdebatan mengenai agama dalam politik tidak pernah terputus. Perdebatan yang didominasi isu mengenai peran Islam dalam politik dan hukum Indonesia itu masih terus berlangsung hingga kini, 20 tahun setelah proses demokratisasi berjalan. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan beberapa ungkapan baru yang menyuarakan aspirasi serupa tentang peran agama, khususnya Islam, yang lebih besar, dalam konteks negara demokrasi.

Aspirasi mengenai makin sentralnya Islam dalam berbagai sektor kehidupan di Indonesia diungkapkan dalam berbagai wacana dan gerakan sosial-politik. Di bawah ini pemetaan besar situasi setelah 1998.

Perdebatan di Ranah Konstitusi dan Hukum

Di hari-hari di sekitar Proklamasi Kemerdekaan, perdebatan

mengenai syariat Islam yang muncul dalam Piagam Jakarta menjadi sentral dan memolarisasi para pendiri negara-bangsa Indonesia. Setelah Pemilu pertama pada tahun 1955, perdebatan ini muncul kembali, dan berakhir ketika Presiden Soekarno menetapkan Dekrit pada 1959, yang menyatakan kembali kepada UUD 1945. Pernyataan Presiden dalam Dekrit itu, "bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut" berarti tetap membuka ruang penafsiran.

Ketika ada peluang baru dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 di sekitar tahun 2000, isu ini kembali muncul di parlemen meskipun akhirnya keinginan memasukkan kembali "syariat Islam" dalam pernyataan mengenai dasar negara ditolak sebagian besar partai politik.

Ditolaknya "syariat Islam" oleh mayoritas partai politik tidak menutup peluang masuknya aspirasi itu dalam pasal-pasal lain UUD 1945 yang diamandemen (misalnya dalam Pasal mengenai pendidikan Indonesia dan dalam klausul tentang "nilai-nilai agama" yang dapat membatasi HAM). Beberapa UU yang dibuat setelah itu pun menunjukkan pengungkapan aspirasi itu, misalnya dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Anti-pornografi. (Menarik untuk dilihat bahwa sementara kedua UU tersebut memicu kontroversi, pemberian basis legal dalam UU untuk produk halal dan bank syariah relatif tidak memunculkan kontroversi serius. Mengapa?). Bersamaan dengan desentralisasi, muncul apa yang disebut sebagai "perda-perda syariah" (atau disebut dengan nama lain, seperti perda "tata-nilai yang religius") sebagai bagian dari demokrasi di tingkat lokal, termasuk pergulatan politik elektoral.

Saat ini, perdebatan yang cukup mendasar masih muncul sesekali di Mahkamah Konstitusi, ketika menguji UU tertentu. Selama 15 tahun usia Mahkamah Konstitusi, ada tidak kurang dari sepuluh pengujian UU terkait dengan agama. Meskipun

masih perlu pengkajian lebih jauh, dapat dikatakan bahwa sementara MK tidak seprogresif yang diharapkan aktivis HAM (misalnya, untuk membatalkan UU Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama), lembaga tertinggi penafsir konstitusi ini juga kerap menolak permintaan akomodasi agama yang lebih luas (misalnya untuk mengakui hukum Islam tidak terbatas pada hukum keluarga tapi juga hukum pidana, atau mengkriminalisasi hubungan seksual di luar perkawinan secara umum).

MK, sebagaimana pernah diutarakan para hakimnya, ingin menjaga apa yang disebut sebagai "jalan tengah" dalam hal peran agama dalam kehidupan kenegaraan: mengakui peran agama, tapi tidak masuk terlalu jauh sehingga negara menjadi penegak hukum agama.

Upaya memengaruhi kebijakan publik secara konstitusional, baik dalam pembentukan UU di tingkat nasional, perda, maupun perdebatan di MK, adalah upaya-upaya yang masih dapat diterima dalam arena kontestasi negara demokratis. Tentu ada perdebatan di sini mengenai sejauh mana prosedur demokratis dapat digunakan untuk kebijakan-kebijakan yang secara substansial dianggap anti-demokrasi (misalnya jika berujung pada diskriminasi kelompok tertentu). Namun ini dapat dibedakan dari upaya lain yang cakupannya lebih kecil, seperti upaya penegakan khalifah oleh Hizbut Tahrir Indonesia, yang jelas-jelas tak menyepakati demokrasi. Ada juga upaya-upaya lain yang lebih ambivalen sifatnya, seperti yang muncul dalam gagasan yang diusung organisasi seperti Front Pembela Islam dengan jargon "NKRI Bersyariah".

Yang ingin disimpulkan di sini adalah bahwa aspirasi keagamaan dapat saja diperjuangkan untuk memengaruhi kebijakan publik, namun ada banyak ragamnya. Sebagian dapat dianggap absah (*legitimate*), sebagian tampak lebih subversif, dan sebagiannya lagi berada di wilayah abu-abu. Dengan kata lain, tak dapat digeneralisasi, dan masing-masing cara

memperjuangkan aspirasi itu mesti direspons secara berbeda—tak semuanya dapat sertamerta ditolak.

Konflik Antar dan Intra Agama

Ada beberapa cara melihat situasi hubungan antar dan intra komunitas agama di Indonesia pasca 1998. Dua indikator yang kerap dipakai adalah tren konflik-berbasis-identitas pasca 1998, dan tren pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB). Dalam kedua hal ini, ada banyak gambaran buruk dalam berita media massa, namun juga tak sedikit gambaran baik.

Menyangkut tren konflik, setelah ledakan konflik pada tahun-tahun awal setelah 1998, ada penurunan frekuensi konflik yang cukup tajam yang menunjukkan bahwa dampak dari masa transisi perubahan rezim itu telah dapat diatasi. Di antara tahun 1998-2003 ada ledakan konflik, dan yang paling banyak menimbulkan korban adalah konflik antaragama dan antaretnis, sebagaimana terjadi di Maluku Utara, Poso (Sulawesi Tengah), dan Sampit (Kalimantan Tengah). Namun konflik-konflik komunal besar tidak muncul lagi setelah tahun 2004. Grafik kenaikan dan penurunan konflik ini amat mengesankan, yang menunjukkan betapa besar perubahan—negatif dan positif—yang terjadi di tahun-tahun itu (Barron, Jaffrey dan Varshney 2014).

Jenis konflik setelah itu didominasi oleh konflik-konflik yang skalanya lebih kecil, namun tersebar di lebih banyak tempat, dan terjadi dengan frekuensi yang lebih sering. Konflik-konflik tersebut sifatnya antar dan intra-agama. Untuk yang pertama, jenis kasus yang amat sering muncul adalah konflik di sekitar pembangunan rumah ibadah; sedangkan untuk yang kedua adalah konflik sektarian, yang biasanya menyasar kelompok-kelompok intra agama yang lebih kecil dan tidak menjadi bagian dari arus utama. Dalam konteks Muslim, ini misalnya menyangkut serangan terhadap komunitas Ahmadiyah, Syiah, atau Gafatar.

Jika peristiwa-peristiwa seperti ini dapat disebut sebagai ungkapan tindakan intoleransi, maka menarik untuk melihat bahwa dalam rentang beberapa tahun terakhir, tingkat intoleransi dapat dianggap menurun (lihat, misalnya Mietzner dan Muhtadi 2018).

Jenis kekerasan lain adalah terorisme atas nama Islam yang ledakan-ledakan besarnya terjadi antara 2002 dan 2005. Dalam hal penanganan terorisme, Indonesia dikenal cukup berhasil, meskipun sesekali masih muncul letupan-letupannya secara sporadis, khususnya mengikuti kebangkitan ISIS di Suriah dan Irak, yang kini sudah melemah lagi. Bahwa di Jakarta pada tahun 2016 dan di Surabaya pada tahun 2018 ini terjadi aksi-aksi terorisme, ini menunjukkan bahwa masalah ini belum selesai, meskipun tampaknya kekuatan kelompok-kelompok teroris telah menurun cukup drastis.

Dalam beberapa contoh di atas, tindakan intoleransi (yang membatasi ruang gerak komunitas-komunitas keagamaan tertentu) atau radikalisme (yang membawa aspirasi lebih menyeluruh, sebagian bahkan dengan cara kekerasan) perlu direspons bukan semata-mata dengan bahasa agama. Jika persoalannya sudah menyangkut keamanan publik, terlepas dari apakah ada unsur keagamaan atau tidak, maka penanganannya terutama berada pada ranah kepolisian. Yang dipersoalkan di sini bukanlah pandangan (keagamaan) yang dianggap berbeda, dan karenanya harus diubah, tapi bagaimana dalam konteks demokratis, semua pandangan keagamaan mendapat ruang yang setara, tanpa satu kelompok mendiskriminasi atau memarjinalkan kelompok lain.

Agama dalam Politik, atau Politisasi Agama?

Tantangan yang lebih besar dan tampak lebih menonjol dalam beberapa tahun terakhir ini adalah pelibatan agama dalam politik praktis, khususnya di sekitar masa-masa pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden. Politisasi agama

untuk keperluan politik praktis jangka pendek itu sebenarnya sudah lama terjadi. (Lihat, misalnya Muhammad Iqbal Ahnaf, et.al. (2015), yang melihat peran politik lokal dalam konflik keagamaan, baik antar maupun intra agama, di Kupang, Bekasi dan Sampang.)

Namun, sejak Pilpres tahun 2014, dan tampak lebih kuat lagi pada Pilkada DKI pada tahun 2016-2017, yang diikuti dalam Pilkada beberapa daerah pada tahun 2018, tren tersebut tampak menguat. Penelitian Mietzner dan Muhtadi yang dirujuk di atas menunjukkan fenomena menarik di sini, dari pengamatannya pada periode sebelum dan sesudah Pilkada DKI pada tahun 2016-2017. Tanpa membahas penelitian ini secara lebih terinci, secara ringkas dan garis besarnya, dapat dikatakan bahwa mobilisasi menjelang pilkada terjadi bukan dalam konteks menguatnya intoleransi, tapi justru sebaliknya. Mobilisasi itu terjadi dalam konteks tren intoleransi yang justru menurun (dalam rentang sejak beberapa tahun sebelumnya); dan setelah pilkada, ada satu aspek spesifik yang meningkat, yaitu pandangan tentang keharusan memilih pemimpin Muslim di tempat-tempat dimana Muslim adalah mayoritas. Dengan kata lain, proses di sekitar Pilkada telah mentransformasi masyarakat.

Pilkada ataupun Pilpres adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat, namun membawa dampak yang cukup serius. Untuk itu, momen-momen politik seperti ini, khususnya yang terdekat ialah Pilpres 2019, perlu diantisipasi. Menamai momen-momen seperti itu sebagai, misalnya, "meningkatnya intoleransi" atau "gagalnya pluralisme" tidak sepenuhnya tepat, sebagaimana ditunjukkan di atas,

Tapi lebih dari itu ini dapat mengalihkan pandangan kita dari tindakan-tindakan apa yang seharusnya dilakukan, yang mungkin sifatnya amat praktis, tidak selalu terkait dengan upaya mengubah pandangan yang dianggap intoleran itu. Misalnya, dalam pilkada di Kalimantan Barat pada tahun 2018,

yang menunjukkan adanya ketegangan etnis dan keagamaan yang menguat, beberapa pengamat menunjukkan bahwa salah satu hal yang menyelamatkan Pilkada itu adalah tindakan-tindakan praktis misalnya melawan berita bohong yang disebarkan melalui media sosial dengan tujuan provokasi dan mobilisasi. Tindakan koalisi masyarakat sipil dalam hal ini cukup praktis, namun efektif.

Kehidupan Sehari-hari

Di luar beberapa tren di atas yang telah sering dikaji, ada juga kajian-kajian yang lebih luas yang melihat perubahan orientasi keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kajian secara cukup meyakinkan menunjukkan adanya kegairahan baru dalam kehidupan beragama. Sebagiannya menunjukkan peningkatan simbol-simbol keagamaan pribadi, seperti penggunaan pakaian Muslim (Smith-Hefner 2011). Atau pilihan-pilihan konsumsi masyarakat urban (seperti produk halal, bank syariah, musik, atau turisme keagamaan) yang juga meningkat pesat. (Lihat misalnya Fealy dan White 2008)

Meningkatnya penggunaan simbol-simbol keagamaan itu bukanlah fenomena khas Indonesia, juga bukan fenomena khas Muslim. Ia lebih merupakan tren umum yang kerap dijelaskan sebagai pengaruh globalisasi, yang melebur batas-batas dunia lama, tapi juga sekaligus mendorong orang untuk menegaskan identitasnya dalam situasi baru ini. Meskipun demikian, ada pula gejala yang oleh Sandra Hamid disebut sebagai intoleransi yang telah menjadi norma/normal dalam kehidupan sehari-hari (Hamid, 2018).

Kegairahan beragama dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja merupakan fenomena yang berbeda, tapi bisa jadi berjalan paralel bersama dengan fenomena-fenomena yang disebut di atas. Yang jelas, ungkapan keberagamaan konservatif tidak dapat disamakan dengan pandangan intoleran, tindakan intoleran, apalagi radikalisme. Sampai tingkat tertentu, situasi

baru ini mungkin sekadar menandai dunia yang memang sudah berubah. Bukan hanya di Indonesia, di banyak belahan dunia lain termasuk di negara-negara maju dengan demokrasi yang telah stabil sekalipun, tantangan untuk hidup bersama dengan komunitas-komunitas yang memiliki gaya hidup berbeda juga kini lebih sulit. Banyak masyarakat sedang beradaptasi dengan situasi baru ini.

Merespons "api dalam sekam"

Beragam fenomena, mulai dari sektor hukum, politik, hingga kehidupan sehari-hari yang dibahas di atas menunjukkan betapa agama masih merupakan kekuatan penting dalam ruang publik di masa ini. Pentingnya agama dalam ruang publik berjalan bersama dengan kenyataan bahwa di ruang publik yang satu, ada komunitas agama yang beragam, sehingga tak mengherankan jika ada ketegangan, bahkan konflik.

Penelitian PPIM (2018) mengenai anak muda Indonesia (siswa SMA dan Perguruan Tinggi) memberikan peringatan akan adanya "api dalam sekam". Penelitian itu menunjukkan data-data mengenai tingginya pandangan intoleransi di kalangan mereka. Benar, dalam hal tindakan tingkatnya jauh lebih rendah, tapi mungkin itu menunjukkan adanya potensi (sekam) yang sewaktu-waktu dapat menjadi api yang membakar jaringan kebangsaan Indonesia.

Peringatan itu penting diindahkan agar kita tak menjadi lengah, namun juga sebaiknya tak menjadi sumber kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran berlebihan dapat mendorong tindakan-tindakan restriktif atau opresif yang pada gilirannya justru membahayakan demokrasi. Di samping potensi besar itu, nyatanya tak kecil pula upaya yang telah dilakukan pemerintah dan masyarakat sipil untuk membangun masyarakat yang menghargai kemajemukan, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian lain (Noorhaidi Hasan 2018).

Hal lain yang perlu diingat, dan sebagiannya ditunjukkan dalam beberapa hal di atas, adalah bahwa perkembangan-perkembangan baru dalam kehidupan beragama ini perlu direspon secara strategis. Bagaimana pun, perbedaan pandangan keagamaan pasti selalu ada. Selalu ada kelompok yang lebih konservatif atau liberal dari kelompok lain. Ungkapan "moderat" tak hanya bermakna tunggal dan dapat termanifestasi dalam beragam sikap. Dalam perjuangan politik pun ada beragam jenis aspirasi keagamaan, dan demokrasi menerima kemungkinan perjuangan untuk memengaruhi kebijakan agar dapat mengakomodasi gaya atau cara hidup tertentu. Perbedaan-perbedaan seperti itu adalah wajar, dan tak harus diubah atau diseragamkan. Peluang mengekspresikan aspirasi-aspirasi itu tetap harus dibuka dan sebaiknya tak menjadi sumber kecemasan. Tersumbatnya saluran ekspresi untuk aspirasi tersebut justru dapat menjadi malapetaka, sebagaimana ditunjukkan sejarah beberapa negara otoriter.

Untuk itu, kesadaran akan komitmen bangsa untuk menghargai kemajemukan penting untuk terus dihidupkan, dijustifikasi dengan berbagai cara, dan dipromosikan. Tapi filsafat atau ideologi bangsa, termasuk Pancasila, bukanlah jawaban bagi segalanya. Melawan kecenderungan "anti-Pancasila", intoleransi, atau ekstremisme tak bisa hanya dengan mengupayakan perubahan pandangan.

Pendidikan untuk mentransformasi pandangan orang tentu penting sebagai strategi jangka panjang. Namun yang tak kalah penting adalah keterampilan praktis untuk mengelola keragaman itu. Struktur politik untuk ekspresi aspirasi warga (termasuk aspirasi keagamaan) perlu dijaga agar tak didominasi kelompok-kelompok tertentu. Hukum penting ditegakkan untuk menjaga kesetaraan antar warga, tanpa melihat latar belakang pandangan keagamaannya—Muslim, Kristen atau Hindu; konservatif atau liberal, dan sebagainya. Ketika ada ketegangan antar komunitas, aparat negara perlu memiliki keterampilan yang cukup untuk melakukan resolusi konflik.

Di ranah sosial, masyarakat sipil juga memiliki banyak peran yang dapat dimainkan, mulai dari melawan berita bohong, sebagai sumber hasutan kebencian, hingga melakukan mediasi di antara kelompok-kelompok warga negara.***

Bab III
Agama, Nirkekerasan, dan Binadamai

Garis besar bab ini:

- Agama mengandung nilai dan landasan yang kuat untuk nirkekerasan dan binadamai.
- Nirkekerasan dan binadamai tidak sama dengan ketundukan dan kepasifan, tapi justru adalah aksi dan sarana yang kuat untuk mendorong perubahan.
- Aksi nirkekerasan dan binadamai dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dibanding aksi kekerasan dan terorisme.

Sering sekali kita mendengar ungkapan bahwa semua agama pada hakikatnya mengajarkan perdamaian dan tidak membenarkan kekerasan sama sekali. Meski demikian, pada kenyataannya tidak sedikit orang yang masih melakukan atau mendukung aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Begitu juga, citra agama sebagai sumber konflik dan kekerasan yang masih saja melekat di benak banyak orang.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Salah satu alasan mengapa agama begitu mudah dilekatkan dengan kekerasan barangkali adalah karena setiap agama memiliki klaim kebenaran dan juga misi untuk menegakkan kebenaran tersebut. Sementara itu, banyak penganut agama yang masih menyalahpahami perdamaian dan nirkekerasan sebagai kompromi dan kepasifan, yang berlawanan dengan misi tersebut.

Karena itu, tantangan yang dihadapi umat beragama dewasa ini adalah menjalankan misi keagamaan, tanpa menimbulkan benturan dan kerusakan, tapi justru membawa kemaslahatan; menebarkan kebaikan kepada semua kalangan, tanpa mengkompromikan keyakinan, tapi justru memperkokohnya.

Bab ini ingin menyampaikan bahwa tantangan di atas paling mungkin dijawab lewat aksi nirkekerasan dan binadamai. Ini harus dimulai dengan meluruskan kesalahpahaman tentang nirkekerasan dan binadamai di kalangan umat beragama. Setelah itu, bab ini akan menunjukkan bahwa nirkekerasan dan binadamai tidak hanya memiliki landasan kuat dalam ajaran-ajaran agama, tapi juga jauh lebih efektif dibanding aksi-aksi kekerasan, sehingga harus lebih diutamakan.

Lima tradisi keagamaan utama yang berpotensi mendukung nilai nirkekerasan dan binadamai akan dipilih. Kelima agama tersebut dipilih dengan mempertimbangkan latar belakang penyuluh agama di Indonesia, yaitu Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, Kekristenan (Katolik dan Protestan), serta Islam. Nilai-nilai agama dan tradisi lokal, meski sama pentingnya dari agama-agama di atas, tidak dicakup di sini karena pertimbangan tersebut, tapi dapat dibicarakan dalam sesi-sesi diskusi.

Meluruskan Kesalahpahaman tentang Nirkekerasan dan Binadamai

Banyak kalangan masih mengabaikan dan menyepelekan

aksi nirkekerasan dan binadamai karena kekurangpahaman mengenai hakikat dan kekuatan kedua konsep tersebut. Selama ini, damai seringkali hanya dimaknai secara sempit sebagai ketenangan, keselamatan, kepasrahan, dan bahkan kompromi. Perdamaian juga umumnya dipahami sebagai gencatan senjata atau perjanjian mengakhiri pertikaian. Padahal, perdamaian yang hakiki tidak hanya mensyaratkan tiadanya kekerasan langsung atau pertikaian, tapi juga sirnanya kekerasan yang lebih luas pada tataran sistem dan budaya (Lihat Gambar 3.1).

Demikian halnya, istilah nirkekerasan juga sering dimaknai dengan salah kaprah sebagai "tanpa aksi," berdiam diri, dan tak bernyali. Akibatnya, aksi nirkekerasan sering dianggap sebagai konsep yang menjemukan. Padahal, nirkekerasan justru menuntut adanya aksi dan penolakan untuk diam dan tunduk, sehingga tak jarang melibatkan ketegangan.

Gambar 3.1: Ilustrasi Kekerasan dan Perdamaian
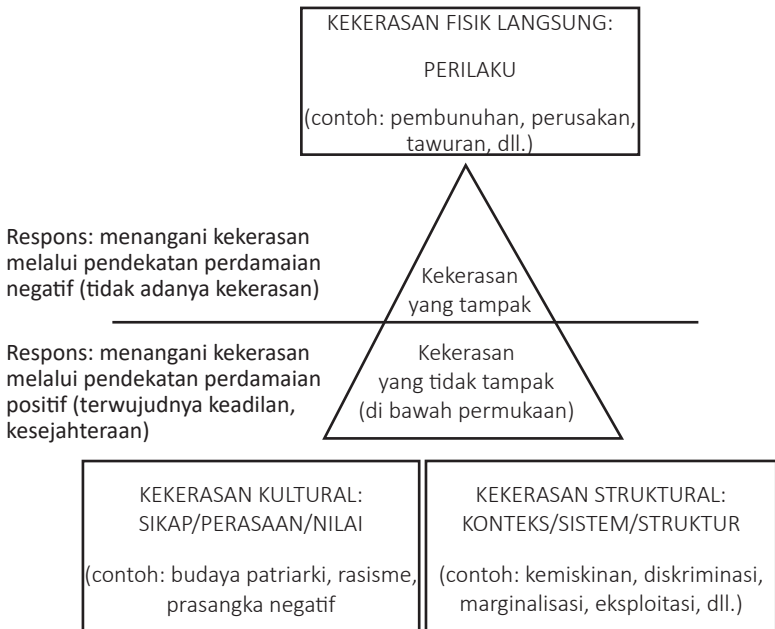
Karena itu, istilah yang digunakan di bab ini adalah "binadamai" (*peacebuilding*) yang lebih luas, bukan "jaga-damai" (*peacekeeping*) atau "cipta-damai" (*peacemaking*) yang biasanya terkait dengan penanganan konflik atau kekerasan. Dalam pengertian ini, upaya-upaya pengentasan kemiskinan, pemberantasan narkoba, pemupukan toleransi, dan pembelaan kaum yang terpinggirkan, bisa juga disebut upaya-upaya bina-damai (Lihat Gambar 3.2).

Gambar 3.2: Jaga-Damai, Cipta-Damai, Binadamai[1]

	"jaga-damai" *(peacekeeping)*	"cipta-damai" *(peacemaking)*	"binadamai" *(peacebuilding)*
Kata kunci	Melerai, memisahkan	Mempertemukan	Merekatkan
Pendekatan	Melibatkan intervensi militer, untuk menghindarkan pertikaian kekerasan para pihak	Melibatkan penengah untuk meraih kesepakatan dan menghentikan konflik antara para pihak	Membangun rasa percaya, memupus prasangka, bekerja-sama menangani masalah bersama
Fokus	Fokus agar konflik kekerasan berhenti / tidak berulang	Fokus pada para pihak (sikap, sentimen, emosi, komitmen).	Fokus pada faktor mendasar dan struktural
Hasil	Gencatan senjata	Kesepakatan damai	Harmoni/ kerukunan

Paradigma Nirkekerasan dan Binadamai dalam Ajaran-ajaran Agama

Hinduisme

Di antara ajaran Hindu yang paling mendukung aksi nirkekerasan dan binadamai barangkali adalah keyakinan bahwa dunia dan alam semesta adalah perwujudan dari keselarasan kosmik. Dalam Hinduisme, para dewa dan dewi

[1] Johan Galtung, "Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding," dalam Johan Galtung, *Peace, War and Defence: Essays in Peace Research*, (vol. II), (Copenhagen: Christian Ejlers, 1976), hal. 302.

ada dalam unsur alam: tanah, air, angin dan api.

Karena itu, bagi umat Hindu, kehidupan ada dalam segala hal dan harus dihormati. Dalam Weda, misalnya, ada kidung puji-pujian untuk dewa hutan, matahari, bulan dan Ibu Gangga. Ajaran-ajaran Hindu banyak mengilhami aksi-aksi nirkekerasan untuk melawan perusakan lingkungan dan melindungi kelestarian alam.

Prinsip Hindu terkait alam semesta ini tampak dalam gerakan Chipko, yang berjuang melindungi hutan dengan merangkul pohon. Bermula di India pada 1974, para perempuan dengan gagah berani menghadang para penebang kayu yang telah mengantongi izin dan tak gentar melindungi pohon dengan memeluknya. Bagi orang Chipko, pohon adalah kehidupan mereka. Jika pohon mesti ditebang, mereka harus dibunuh terlebih dahulu.

Buddhisme

Menurut *Dhammapada*, ayat 202, Gautama Buddha berkata, "Tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi dari kedamaian." Dalam ajaran Buddha, kedamaian batiniah menjadi pijakan yang di atasnya perdamaian sosial yang lebih besar diciptakan. Kedamaian lahiriah di masyarakat tidak mungkin terwujud jika batin dan pikiran diri masih dikungkung oleh keinginan mementingkan diri sendiri dan kemarahan dan angan-angan. Untuk menyemai perdamaian, tiga keinginan ini mesti ditaklukkan.

Hanya individu yang mencapai tingkat kepribadian tertinggi atau *paurushodaya* yang mampu menunjukkan jalan pembebasan kepada yang lainnya. Ajaran Buddha untuk menginsafi setiap tindakan dan tidak memaksakan kehendak atau menang sendiri, sangat kondusif bagi aksi nirkekerasan dan binadamai.

Prinsip Buddha terkait kedamaian batiniah dan lahiriah ini tercermin dalam gerakan Sarvodaya Shramadana di Sri Lanka. Menurut falsafah gerakan ini, perjuangan untuk menyucikan batin dan pikiran mesti berlanjut ke perjuangan membenahi rantai sosial-ekonomi yang tidak adil dan memperbudak manusia. Berawal dari 1958, gerakan ini berkembang selama dua dasawarsa ke seantero negeri, menularkan semangat swadaya dan kemandirian.

Konfusianisme

Konfusianisme mempunyai suatu kerangka etis yang kokoh mengenai perilaku hubungan manusia. Di antara kebajikan-kebajikan yang diusung Konfusianisme, *jen* barangkali adalah yang terpenting. Ia mengandung makna *welas asih, kebajikan, kebesaran dan kebaikan hati*. Konsep etik ini menyiratkan penghormatan kepada martabat segenap manusia di mana pun berada.

Dalam menyelesaikan konflik dan pertikaian secara damai, yang mensyaratkan itikad baik dan penghormatan terhadap martabat para pihak, *jen* dapat menjadi rujukan. Seseorang yang memiliki *jen* akan mengutamakan “kebesaran hati” tanpa melihat sekat-sekat kelompok dan bangsa, karena orang yang memiliki *jen* mengetahui bahwa di berbagai penjuru dunia, semua manusia adalah bersaudara.

Kekristenan (Katolik dan Protestan)

“Berbahagialah para pembawa perdamaian,” demikian bunyi ayat Injil terkenal dari “Khotbah di atas Bukit” (Matius 5:9). Perdamaian merupakan unsur yang penting dalam Kekristenan. Dan, seperti tersirat dari ayat ini, perdamaian tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus diciptakan dan dibangun.

Yesus mengajarkan bahwa perdamaian dapat diwujudkan dengan bertindak adil kepada semua orang dan melindungi kaum yang lemah. Khotbah pertama Yesus di bait suci seperti

termaktub dalam Lukas 4:18-19 menyebutkan bahwa Dia datang untuk "menyampaikan kabar gembira kepada kaum papa… pembebasan kepada para tawanan, penglihatan bagi yang buta, untuk membebaskan mereka yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang."

Itulah sebabnya Tuhan memberkati mereka yang mengupayakan perdamaian dan persaudaraan.

> Misi Yesus yang diungkapkan dalam khotbah pertama itu menginspirasi tokoh-tokoh seperti pendeta Martin Luther King Jr. yang melakukan aksi nirkekerasan untuk menentang diskriminasi terhadap orang kulit hitam di Amerika Serikat; Uskup Agung Oscar Romero yang menjadi martir demi membela kaum papa di El Salvador, serta pendeta Jacky Manuputty di Maluku, yang mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan konflik Muslim-Kristen pada masa transisi demokrasi di Indonesia dan terus berjuang melawan para perusak lingkungan hingga kini.

Islam

Ada setidaknya dua unsur utama dalam Islam yang mendukung perdamaian. Pertama adalah prinsip *tauhid* yang tercermin dalam *syahadat* atau ikrar keimanan. Kedua adalah penentangan terhadap ketidakadilan seperti ditegaskan dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh teladan kenabian.

Syahadat dimulai dengan penafian: tidak ada tuhan. Ini menyiratkan semangat pemberontakan terhadap seluruh tatanan dan perhambaan, untuk dapat tunduk kepada satu-satunya otoritas, yaitu Allah. Penyerahan diri kepada kehendak Tuhan ini, yang merupakan makna harfiah kata "Islam", menegaskan kesatuan manusia dan mengakhiri dominasi manusia atas manusia lain.

Perintah untuk melawan tatanan yang tidak adil untuk membela kaum *mustad'afin* (yang tertindas) ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 75. Dalam ayat tersebut, setiap Muslim

diwajibkan untuk "memerangi" ketidakadilan dan bukan justru melakukan ketidakadilan; untuk melawan penindas dan bukan malah menjadi penindas. Kecenderungan-kecenderungan kepada aksi demi perubahan bagi kehidupan yang lebih baik itu merupakan unsur Islam yang mendukung nirkekerasan dan binadamai.

> Lebih dari setengah abad yang lalu, Abdul Ghaffar Khan, yang dijuluki "Gandhi dari Perbatasan," mendirikan Khudai Khidmatgar (Hamba Allah) untuk mendorong pembaruan sosial, politik dan ekonomi di perbatasan barat laut anak benua India, tempat kaum Pasthun berada. Khan, yang adalah Muslim yang taat, juga memimpin gerakan kemerdekaan melawan pemerintahan British Raj. Upaya-upayanya itu dilakukan tanpa kekerasan. Untuk menjadi anggota kelompoknya, orang-orang Pasthun disyaratkan bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah menggunakan kekerasan, tapi menggunakan metode-metode konstruktif.

Aksi Nirkekerasan dan Binadamai sebagai Alternatif Terorisme dan Kekerasan

Selain karena telah diserukan oleh ajaran-ajaran agama, aksi nirkekerasan dan binadamai juga seharusnya lebih diutamakan karena memang lebih efektif dibanding cara-cara kekerasan. Sebuah studi yang mengkaji ratusan kampanye kekerasan dan nirkekerasan dari 1900 sampai 2006 menemukan bahwa kampanye nirkekerasan hampir dua kali lipat lebih berhasil dibanding kampanye dengan kekerasan.

Seperti sudah disinggung di atas, contoh-contoh aksi nirkekerasan dan binadamai yang diilhami oleh ajaran agama sebetulnya tidak sedikit. Namun karena ketidakacuhan, kasus-kasus tersebut seringkali luput dari perhatian. Yang selalu menjadi pusat perhatian adalah aksi-aksi kekerasan yang didorong ajaran agama seperti konflik komunal dan terorisme yang dampaknya justru merusak dan merugikan, alih-alih

membawa perbaikan dan kemaslahatan.

Tapi, kekerasan berlatarbelakang agama tidak cukup dilawan dengan kecaman atau pengelakan, misalnya dengan mengatakan bahwa pelaku kekerasan itu tidak beragama atau agama tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kekerasan. Ini karena banyak penganut agama yang masih meyakini kekerasan sebagai satu-satunya jalan ke arah perubahan. Jadi, terorisme dan kekerasan harus dilawan dengan diubah ke dalam bentuk-bentuk yang lebih konstruktif.

Di sinilah aksi nirkekerasan dapat menjadi alternatif terorisme, persis karena ada kesamaan penting antara keduanya, yaitu: semangat perlawanan terhadap ketidakadilan dan kerelaan untuk mati demi cita-cita mulia. Namun demikian, terdapat dua perbedaan mendasar di antara keduanya, yaitu: penafian orang tak berdosa, dan pengorbanan manusia sebagai objek. Terorisme tidak dapat dijadikan pilihan karena mengorbankan orang tak berdosa dan merendahkan manusia yang kedudukannya dilindungi dalam ajaran-ajaran agama.

Aksi nirkekerasan dapat menjadi alternatif aksi kekerasan jika kesamaan antara keduanya diangkat dan perbedaan antara keduanya diatasi. Banyak contoh pemuka agama yang berjuang dengan gagah berani bahkan rela mati melawan para penjajah dan penindas, tanpa kekerasan dan tanpa mengorbankan tujuan ilahiah. Dengan begitu hakikat dan cita-cita agama sebagai pembawa damai dapat terwujud dan lestari.***

Bab IV
Analisis dan Transformasi Konflik

Garis besar bab ini:

- Menyediakan informasi yang akurat tentang situasi yang terjadi bagi pemangku kepentingan lain;
- Mengidentifikasi fase konflik yang tengah berlangsung dan melibatkan siapa saja;
- Mengenali posisi, kepentingan, dan kebutuhan setiap aktor di balik perselisihan; dan,
- Menyajikan pilihan-pilihan tindakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (di tingkat daerah, nasional, atau, bila perlu, tingkat internasional) dengan tujuan pengambilan keputusan dan tindakan pencegahan.

Konflik dan Kekerasan

Entah dari mana asalnya, ketika mendengar kata "konflik", kita biasanya menghubungkan dengan situasi perselisihan, sengketa, pertarungan, perkelahian, perusakan, kerusuhan, perusakan, pertempuran, kekerasan, dan perang. Padahal, menurut pakar konflik dan binadamai, "konflik" adalah situasi

yang tidak mungkin dihindari karena kita makhluk sosial, sementara kekerasan bisa kita jauhi (Galtung, 1966). Mengapa demikian?

Hubungan seseorang dengan orang lain dikatakan konflik ketika memenuhi tiga syarat yang dikenal dengan segitiga A-B-C:

Gambar 4.1: Ilustrasi Kekerasan dan Perdamaian
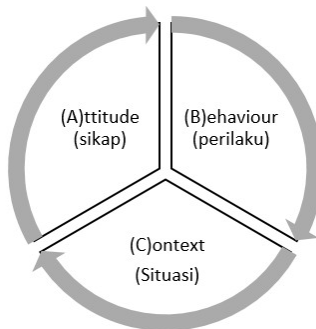
A. *Attitude* (sikap): menyangkut aspek kognisi atau pikiran seperti gambaran tentang "musuh" dan emosi seperti rasa permusuhan, yang dialami pihak-pihak yang terlibat konflik.

B. *Behavior* (perilaku): kegiatan, perkataan, dan perilaku aktual yang terpecah dan merusak hubungan pihak-pihak yang terlibat.

C. *Context* (situasi): ketidakselarasan tujuan, kebutuhan, dan kepentingan berbagai pihak. sumbernya: struktur sosial, nilai sosial, kelangkaan, atau kompetisi.

Singkatnya, konflik harus terdiri dari tiga unsur di atas, yakni situasi perselisihan akibat ketidakselarasan tujuan, melibatkan sikap dan rasa permusuhan, dan menuangkannya dalam perkataan dan perilaku. Situasi ini bisa berakhir damai

jika diambil jalan keluar negosiasi atau berakhir kekerasan jika tidak menemukan jalan keluar lain selain kekerasan.

Sepak bola bisa menjadi ilustrasi. Sebelas pemain tim A bertanding melawan 11 pemain tim B. Mereka berada dalam situasi (*context*) ketidakselarasan tujuan, di mana tim A bertujuan merebut bola dan menjebloskan ke gawang tim B, begitu juga sebaliknya. Kesebelasan tim A bersikap (*attitude*) dalam pikirannya untuk tidak menyerahkan penguasaan bola kepada kesebelasan lawan. Dan, kesebelasan tim A akan berperilaku (*behavior*) seperti menendang, menyundul, dan membagi bola hanya dengan kesebelasannya untuk menghasilkan *goal* ke kandang lawan.

Kedua kesebelasan, dalam hal ini tengah berada dalam "konflik". Jika ada pelanggaran, kedua kesebelasan bisa bersalaman dan main lagi (damai), dan bisa juga baku pukul dan baku lempar (kekerasan). Dengan demikian, konflik belum tentu berarti kekerasan, sebab konflik bisa juga diselesaikan dan disalurkan dengan nirkekerasan atau tanpa kekerasan.

Tahapan konflik

Mengingat konflik dapat berakhir perdamaian atau kekerasan, maka setiap konflik melewati tahap-tahapan tertentu, lihat pada gambar 4.2.

Konflik tidak pernah muncul tiba-tiba. Konflik dimulai dari perbedaan-perbedaan. Beda identitas, beda etnis, beda agama, beda warna kulit, hingga beda pilihan politik. Akibat ketidakselarasan tujuan, perbedaan tersebut kemudian mulai dipandang sebagai ancaman. Biasanya persepsi bahwa beda sebagai ancaman diungkapkan dalam beragam stigma. Misalnya, "jangan menikah dengan orang Sunda, mereka pemalas"; "jauhi orang Maluku, mereka kasar"; "hindari berteman dengan orang Cina, kalau tidak nanti harta kamu dikuras"; dan seterusnya. Dalam situasi konflik, pernyataan-

pernyataan demikian di warung kopi mengandung makna dan memecah belah.

Gambar 4.2: Ilustrasi Kekerasan dan Perdamaian
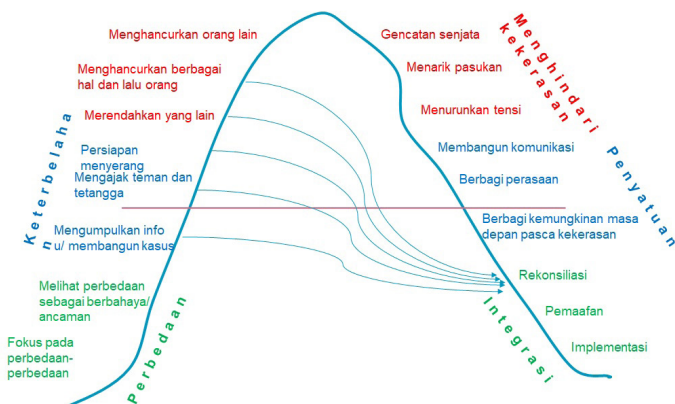
Setelah melabeli pihak lain sebagai ancaman, lama kelamaan ada orang yang mencari-cari kesalahan orang yang dilabeli. Misalnya, seorang pengusaha Tionghoa belum bisa bayar anak buahnya karena belum ada uang. Situasi ini kemudian dijadikan kasus oleh pihak yang tidak suka dan membesarkan pandangan bahwa "orang Cina mengeksploitasi pegawai lokal."

Semakin lama stigma di atas dengan meluas dan dipercayai oleh banyak orang yang tidak tahu duduk persoalannya. Mereka kemudian berkumpul dan mempersiapkan protes dengan semua alat yang dimiliki. Ketika massa sudah berkumpul dan diteriaki dengan bermacam cacian dan makian, bisa jadi menggerakkan orang untuk mulai melempar apa saja yang mereka pegang. Dan, akhirnya kekerasan mereka lakukan.

Sampai di sini, kita menyaksikan bahwa dari konflik ke kekerasan membutuhkan waktu tertentu. Inilah yang terjadi pada kasus seperti kekerasan di Cikeusik kepada anggota Ahmadiyah; pembakaran masjid di Tolikara, perusakan gereja

di Aceh Singkil, dan pembakaran vihara di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dari perseteruan awal ke pecahnya kekerasan melalui beberapa tahap atau fase yang seringkali luput dari perhatian kita.

Berdasarkan tahapan di atas, kekerasan sebetulnya bisa dihindari. Dalam banyak kasus, membangun komunikasi, berbagai perasaan, berbagi kemungkinan masa depan pasca konflik kekerasan, dan rekonsiliasi setelah melewati masa krisis bisa menghindarkan kekerasan dalam konflik. Sebetulnya, perseteruan tahap awal, seperti ketika ada pihak yang coba membangun kasus, kita bisa segera lakukan pertemuan untuk klarifikasi. Dalam beberapa temuan penelitian, konflik pada tahap awal ini bisa dinetralisasi dengan perjumpaan dan klarifikasi.

Langkah-langkah Pencegahan Konflik?

1. Membangun visi bersama. Di masyarakat yang majemuk, sudah tentu timbul pandangan dan persepsi yang berbeda mengenai berbagai macam hal, termasuk mengenai konflik dan perdamaian. Ada yang menekankan dampak perilaku dan kekerasan konflik, seperti korban yang jatuh dan kerusakan yang ditimbulkan, ada pula yang menekankan situasi dan penyebab struktural konflik seperti ketimpangan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia. Ada yang menganggap perdamaian adalah ketiadaan dan penghentian tindakan kekerasan, ada pula yang menganggap perdamaian sebagai terpenuhinya semua kebutuhan pokok masyarakat. Kegiatan membangun visi bersama, misalnya melalui dialog dan lokakarya, sangat perlu supaya pihak-pihak yang terlibat menyepakati respons dan tindakan bersama.

2. Mengidentifikasi gelagat atau gejala dini yang menunjukkan bahwa konflik yang mengandung kekerasan dapat terjadi di suatu masyarakat. Bila sejak

dini kita memiliki informasi dan pengetahuan mengenai gelagat konflik, berart ada waktu merumuskan dan menerapkan tanggapan atau tindakan yang dapat dilakukan terhadap gelagat tersebut. Informasi mengenai gelagat konflik juga perlu disosialisasikan supaya masyarakat memiliki kesadaran tentang persoalan yang mereka hadapi. Kesadaran masyarakat luas ini diperlukan supaya tercipta kemauan politik (*political will*) untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan.

3. Mengkaji ciri-ciri daerah yang diduga akan dilanda konflik. Ketika merencanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan konflik, kita harus memperhatikan keanekaragaman daerah dilihat dari sudut komposisi penduduk, kompleksitas masalah, dan kegawatan situasi yang dihadapi. Yang perlu diperhatikan adalah soal-soal yang menyangkut politik dan kepemimpinan politik, ekonomi dan lingkungan, dan masalah-masalah sosial serta kependudukan. Perkiraan dan analisis terhadap ciri-ciri setempat ini perlu supaya kita dapat merumuskan jalan keluar yang sesuai dengan kondisi dan situasi daerah tersebut.

4. Mengajak dan melibatkan pemerintah, dewan perwakilan rakyat, organisasi, lembaga, kelompok masyarakat, dan pihak-pihak lain yang penting dan berkepentingan dalam pencegahan konflik. Untuk itu, ada baiknya para aktor yang terlibat relatif berkepentingan dengan kegiatan pencegahan konflik dan memiliki potensi yang cukup besar dalam memperluas dampak yang akan timbul dari kegiatan tersebut. Juga perlu diperhatikan pihak atau aktor mana yang paling penting dalam usaha mencegah konflik. Kegiatan koordinasi dan membangun dukungan terhadap usaha pencegahan konflik akan lebih mudah dijalankan bila pihak yang terpenting dan penting diikutsertakan di dalam kegiatan.

5. Mendasarkan rencana pencegahan konflik berdasarkan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki lembaga, organisasi, atau kelompok yang ikut serta dalam usaha tersebut. Supaya kegiatan pencegahan konflik dapat berjalan berkesinambungan, kegiatan tersebut harus didasarkan atas kapasitas dan kemampuan setempat. Pengalaman menunjukkan bahwa kapasitas suatu masyarakat dalam mengelola konflik dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, penerapan hak asasi manusia, dan kerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang beraneka ragam. Pihak luar, misalnya polisi, lembaga penelitian universitas, dan LSM, dapat menjadi fasilitator atau pendamping yang menyediakan bantuan pengetahuan dan keterampilan. Tetapi modal utama dan inisiatif pencegahan konflik harus dilandaskan atas kapasitas setempat.

6. Menjalin suasana saling pengertian dan kemitraan dengan pemerintah, aparat keamanan, atau kelompok-kelompok yang berkepentingan. Di kalangan pemerintah dan aparat keamanan, bisa saja timbul kecurigaan terhadap usaha-usaha perencanaan dan kegiatan pencegahan konflik. Sebab, mereka terbiasa menangani konflik ketika meletus menjadi kekerasan terbuka dan meluas. Perlu diluangkan waktu beraudiensi dengan pemerintah dan pemegang otoritas lainnya. Selain itu, di dalam suatu masyarakat bisa jadi ada kelompok tertentu yang dapat mengganggu atau menggagalkan rencana pencegahan sehingga mereka juga perlu diperhitungkan.

7. Langkah dan respons yang diambil dalam kegiatan pencegahan konflik sebaiknya dibedakan kepada langkah jangka pendek (misalnya setahun), jangka menengah (misalnya 2-4 tahun), dan jangka panjang (misalnya 10 tahun). Dengan menyusun penjangkaan

yang rapi, langkah yang satu akan memperkuat langkah yang lain, sehingga dampak yang timbul juga menjadi lebih langgeng.

8. Langkah dan respons yang diambil dalam kegiatan pencegahan konflik sebaiknya mencakup langkah di berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti bidang politik dan pemerintahan, bidang ekonomi, dan bidang sosial-kebudayaan. Perhatian kepada berbagai dimensi kehidupan ini perlu mengingat gelagat konflik yang banyak dan bersumber dari berbagai lapangan kehidupan masyarakat. Ini juga mengisyaratkan perlunya kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak dan lembaga yang terlibat dalam pencegahan konflik.

9. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan atau program pencegahan konflik dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan program. Hal ini juga memungkinkan meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerintah di bidang pencegahan konflik berdasarkan pengalaman pencegahan konflik sebelumnya.

Petunjuk/Indikator Apa yang Perlu Diperhatikan?

Petunjuk, gelagat, atau indikator konflik bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Sebagian dari indikator konflik bersifat umum dan lumrah didapat dalam berbagai kasus. Sebagian lainnya adalah indikator atau gelagat yang khas di suatu tempat. Seringkali masyarakat di suatu tempat memiliki penginderaan yang lebih tajam mengenai potensi dan gelagat konflik di lingkungan mereka. Namun ada kalanya mereka tidak memiliki mekanisme yang ampuh untuk merumuskan dan menerapkan tindakan dan respons terhadap gelagat tersebut.

Petunjuk atau gelagat tersebut ada yang bersifat politis, ekonomi, sosial budaya.

- Contoh gelagat konflik yang sifatnya politis adalah: pelanggaran hak asasi manusia (seperti penangkapan semena-mena, penculikan, pembunuhan politik); peledakan bom, pengungsian, campur tangan militer dalam masalah-masalah politik.
- Contoh gelagat konflik yang sifatnya ekonomis adalah: pengangguran, kemiskinan, kesenjangan pendapatan, masalah tanah/lahan, kemerosotan lingkungan hidup, dll.
- Contoh gelagat konflik yang sifatnya sosial-budaya adalah: diskriminasi (berdasarkan ras, etnis, agama, dan gender), kurangnya akses ke media massa, ketiadaan pengakuan terhadap identitas budaya suatu kelompok, dll. Petunjuk atau gelagat konflik juga dapat dibedakan kepada indikator struktural, indikator pemicu, dan indikator akselerator.

Gelagat yang bersifat struktural dan melembaga di dalam masyarakat bermacam-macam bentuknya. Seringkali, gelagat struktural ini dianggap sebagai latar belakang atau kondisi konflik. Contohnya adalah pengucilan politik secara sistematis terhadap kelompok atau golongan tertentu, ketimpangan ekonomi yang parah, kemerosotan lembaga-lembaga publik, pergeseran demografis, kemerosotan lingkungan dan lahan, dan perubahan sosial yang mendasar.

Gelagat pemicu adalah peristiwa tertentu yang menjadi katalis meletusnya kekerasan. Peristiwa yang dapat memicu kekerasan amat bervariasi, seperti pembunuhan, perkelahian, penipuan dalam pemilihan umum, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain.

Indikator atau gelagat akselerator, yaitu peristiwa atau perkembangan tertentu yang dapat meningkatkan suasana tegang dan menonjolkan sisi yang paling rawan di dalam masyarakat. Bentuknya pun bisa beraneka ragam, seperti masuknya pendatang atau migran baru, peralihan fungsi lahan (dari pertanian ke industri), munculnya ketentuan atau

peraturan baru dari pemegang otoritas, kenaikan harga-harga sembako, dan lain-lain.

Catatan Penutup

Apabila kita sudah merumuskan rencana aksi dan menerapkannya dalam rangka mencegah dan menanggulangi konflik, persoalan belum selesai. Kita masih perlu memperhatikan beberapa hal lain demi kelangsungan dan kesinambungan kegiatan. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah:

- Perhatikan dan cermat dampak dan konsekuensi yang timbul dari program pencegahan konflik terhadap pihak-pihak yang secara langsung dan tidak langsung terkait dengan program pencegahan tersebut.
- Cermat siapa (atau pihak mana) yang mendukung, menentang, atau netral sehubungan dengan program pencegahan konflik, dan dari kalangan mana mereka (dilihat dari sudut politik, ekonomi, dan sosial-budaya).
- Fleksibilitas dan ketidakterdugaan perlu juga mendapatkan perhatian kita. Dalam kehidupan sosial, lebih-lebih di masa pancaroba seperti sekarang ini, banyak sekali unsur-unsur ketidakpastian dan ketidakterdugaan. Oleh sebab itu, sambil kita merancang rencana pencegahan dan menerapkannya, kita juga perlu terbuka kepada perubahan dan penyesuaian bila dirasa perlu.***

Bab V
Hoaks dan Ujaran Kebencian: Teknik dan Strategi Melawannya

Garis besar bab ini:

- Peserta memahami perbedaan hoaks, ujaran kebencian, dan pelintiran kebencian
- Peserta dapat mengidentifikasi narasi kebencian, kontranarasi, dan narasi alternatif
- Peserta dapat membuat dan menyebarkan kontranarasi dan narasi alternatif dalam konteks daring (*online*) maupun luring (*offline*)

Konflik dan ekstremisme kekerasan muncul di masyarakat umumnya diawali dengan rumor dan narasi kebencian di masyarakat. Sejumlah perundungan, kebencian, hasutan online, belakangan ini meningkat. Dibutuhkan cara untuk mengenali dan memeriksa konten di media sosial yang mengarah pada rumor dan ujaran kebencian. Dampaknya, masyarakat terpecah, saling curiga dan saling menjelek-jelekan.

Hoaks dan Ujaran Kebencian

Secara sederhana, hoaks dipahami sebagai berita bohong atau tidak benar. Tersebarnya hoaks bukan hanya karena seseorang memiliki niat buruk, tapi juga karena seseorang tidak mengetahui secara jelas informasi tersebut dan tidak sempat memeriksa lebih detail sebelum menyebarkannya.

Sementara itu, ujaran kebencian meliputi unsur-unsur berikut:

- *Segala bentuk komunikasi*, baik langsung maupun tidak langsung;
- Didasarkan pada *kebencian atas dasar suku, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, etnis, dan identitas lainnya*;
- Ditujukan sebagai hasutan terhadap *individu atau kelompok* agar terjadi *diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial*;
- Dilakukan melalui *berbagai sarana*.

Ujaran kebencian beredar di masyarakat biasanya tidak didukung data dan fakta yang meyakinkan. Misalnya, seseorang benci pada suatu kelompok. Dia lalu melekatkan sifat-sifat buruk kepada pihak yang dibenci. Lalu dia sebarluaskan kepada keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar. Stigma tersebut kemudian memotivasi orang melihat perbedaan sebagai ancaman, bukan kekayaan satu bangsa.

Ujaran kebencian berbahaya karena:

- *Merendahkan martabat manusia*, ujaran itu bahkan seringkali menyasar manusia yang sudah rentan dan terpinggirkan;
- *Menyuburkan prasangka dan diskriminasi*, ujaran kebencian bisa mengakibatkan pengucilan dan diskriminasi;
- *Dapat memicu kekerasan/kejahatan kebencian*, kerugian material dan korban kekerasan berbasis identitas seringkali lebih besar daripada kekerasan lainnya;

- *Dapat memicu konflik*, ujaran bisa meluas menjadi konflik antar kelompok dan paling buruk dapat menyebabkan pemusnahan kelompok (genosida);
- *Bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika*, karena ujaran kebencian menyalahi persatuan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Melawan Ujaran Kebencian dan Membangun Narasi Baru

Ujaran kebencian menjadi lebih rumit sebab ada pihak yang oleh Cherian Goerge disebut sebagai wirausahawan kebencian yang memainkan hasutan dan keterhasutan secara bersamaan. Mereka memelintir ujaran kebencian sedemikian rupa untuk kepentingan politik. Misalnya ujaran kebencian kepada keturunan Tionghoa. Mereka seringkali dituding bukan Indonesia, tidak punya hak sebagai warga negara, bahkan muncul nada keinginan mengusir mereka. Dalam beberapa pilkada, ceritanya berkembang menjadi anti-asing dan anti-aseng.

Narasi berperan penting karena dapat memengaruhi bagaimana kita berpikir, memahami kondisi di sekitar, bahkan menjadi acuan keputusan tindakan. Jika narasi ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme yang mengarah pada kekerasan lebih banyak beredar di masyarakat, besar kemungkinan beberapa unsur di masyarakat meyakininya sebagai hal yang benar dan berakibat perpecahan bangsa.

Permasalahannya, terkadang aspek intoleransi dalam sebuah cerita tidak dapat dikenali dengan mudah. Elemen-elemen intoleransi seringkali sembunyi dalam ejekan dan candaan yang sudah lama bergulir di masyarakat. Oleh karena itu, penting mengenali ujaran kebencian dari beberapa aspek berikut:

- *Muatan dan nada ujaran*, ada yang menggunakan bahasa halus dan keterangan yang keliru mengenai suatu kelompok tapi ada juga yang menggunakan bahasa yang lebih ekstrem dan terang-terangan menyerukan orang lain untuk melakukan kekerasan;

- *Maksud pelaku ujaran, apakah untuk melukai atau menghasut*, hasutan kadang disengaja tapi kadang tidak sengaja. Ungkapan di bawah ini sama-sama buruk dan intoleran, tapi boleh jadi berbeda niatnya, sehingga perlu ditanggapi secara berbeda pula.

- *Sasaran atau sasaran potensial, kelompok rentan*, beberapa orang atau kelompok lebih rentan dari yang lain, entah itu karena perlakuan masyarakat, media, atau keadaan kelompok itu sendiri yang tak bisa mempertahankan diri.

- *Konteks*, perhatikan budaya dan sejarah di sekitar ujaran, termasuk media, khalayak yang menjadi sasaran, prasangka yang ada di masyarakat, serta 'otoritas' pelaku ujaran, dan sebagainya.

- *Dampak potensial*, ini adalah pertimbangan yang terpenting dalam menimbang hasutan kebencian dan menentukan tindakan. Jika sebuah ucapan berpotensi memantik aksi kekerasan terhadap target yang dilakukan oleh pihak ketiga, baik individu maupun kelompok; menyebabkan respons emosional dari target, seperti perasaan terhina dan stres; dan memengaruhi sikap masyarakat dengan menyebarkan kebencian atau memelintir kenyataan, maka besar kemungkinan ucapan tersebut adalah bentuk ujaran kebencian.

Setelah mengenali ujaran kebencian, langkah berikutnya adalah melawan ujaran kebencian tersebut dengan membuat narasi tandingan atau kontranarasi, dengan kata lain menciptakan narasi baru/alternatif. *Kontranarasi adalah balasan tangkisan singkat, cepat, dan langsung untuk melawan ujaran kebencian.*

Kontranarasi digunakan sebagai instrumen untuk melawan ekspresi kebencian yang sangat nyata. Dengan demikian, ruang publik tidak dikuasai oleh ujaran kebencian saja, namun juga narasi damai yang melemahkan narasi kebencian.

Narasi alternatif bertujuan untuk menghentikan hasutan kebencian dengan fokus pada tujuan yang lebih besar; menguatkan ide-ide dengan tujuan yang positif, inklusif, dan konstruktif, termasuk bagi mereka yang memproduksi ujaran dan hasutan kebencian. Narasi alternatif tidak memfokuskan diri pada satu kejadian saja, melainkan membangun narasi yang dapat membuat perubahannya lebih berkelanjutan. Strategi ini tidak melawan hasutan kebencian secara langsung, tetapi memengaruhi diskusi di masyarakat sehingga mengubah narasi yang bergulir di publik.

Kedua strategi ini tidak berjalan masing-masing melainkan saling melengkapi. Inisiator perdamaian di masyarakat perlu bekerja lebih aktif, bukan reaktif, dengan menciptakan lebih banyak narasi-narasi alternatif untuk melemahkan hoaks, rumor, dan ujaran kebencian. Di waktu yang sama, inisiatif-inisiatif yang berorientasi jangka panjang tidak bisa menghindari aksi-aksi reaktif jika memang mendesak.

Teknik Membuat Kontranarasi

Langkah 1: Definisikan Tujuan

Rumuskan definisi yang jelas siapa target dan apa tujuan kontranarasi dengan tujuan agar dapat mengidentifikasi capaian utama dan mengukur keberhasilan kontranarasi yang dibuat. Tujuan bisa jangka panjang maupun jangka pendek, tergantung dengan kebutuhan. Pastikan tujuan yang dibuat realistis, singkat, spesifik, dan jelas.

Langkah 2: Definisikan Target

Kelompok yang berbeda memiliki sikap, perilaku, cara berpikir,

dan peran yang berbeda dalam menyebarkan kontranarasi ujaran kebencian. Jika target adalah pembaca/pendengar secara luas, buatlah karakter fiksi yang cukup merepresentasikan kebutuhan, perilaku, dan karakteristik pembaca. Selain kelompok, posisi dan peran masyarakat juga berbeda dalam diskusi. Peran-peran itu antara lain:

- Pengamat Pasif

Pengamat pasif adalah mereka yang mengetahui adanya ujaran kebencian, intoleransi, bahkan pesan radikalisme yang mengarah ke tindak kekerasan, namun tidak melakukan apapun untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi. Mereka bisa saja mengabaikan, cuek, dan menganggap itu bukan urusan mereka. Perlu dilakukan dialog untuk mengubah sikap pasif itu menjadi lebih aktif, salah satunya dengan melakukan dialog, sosialisasi, dan pelatihan, untuk meningkatkan kesadaran mereka. Harapannya, mereka yang telah terpapar informasi terkait intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme kekerasan mau lebih aktif melawannya.

- Korban

Korban adalah kelompok yang menjadi target dalam ujaran kebencian, intoleransi, maupun ekstremisme berbasis kekerasan. Hal yang sangat penting bagi korban adalah strategi untuk melindungi diri mereka dari berbagai ekspresi kebencian. Mereka juga butuh untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan mereka untuk melihat permasalahan yang sesungguhnya. Misal, dengan melaporkan kekerasan yang dialami dan mengajak orang lain untuk melawan ujaran kebencian.

- Pembenci dan Yang Berpotensi menjadi Pembenci

Peran ini ditujukan pada pembuat dan penyebar ujaran kebencian. Mereka yang hanya menyebarkan konten kebencian juga berperan meskipun tidak secara langsung mengajak orang untuk melakukan kekerasan. Mereka mungkin tidak

menyadari konten tersebut berbahaya dan dapat menyakiti orang lain. Bagi kelompok ini, diperlukan aktivitas atau kampanye yang menekankan pada pengetahuan dan keterampilan untuk memahami dan mematahkan prasangka dan bias negatif terhadap suatu kelompok serta tanggung jawab dalam membuat dan membagikan konten (kebencian) pada orang lain.

- Aktivis

Aktivis adalah peran yang dimiliki orang-orang yang telah menyadari bahaya ujaran kebencian dan berupaya untuk mencegah narasi kebencian bertahan di masyarakat. Ya, Anda lah aktivis itu. Aktivis menganggap semua orang berpotensi untuk melawan ujaran kebencian dan mensosialisasikannya melalui berbagai kampanye. Kampanye-kampanye ini, khususnya di internet, memerlukan keterampilan tertentu, seperti publikasi, promosi, membangun dukungan dan menyusun pesan dan narasi berbeda untuk target dan platform tertentu. Keterampilan-keterampilan ini yang perlu diperkuat untuk aktivis di lapangan.

Langkah 3: Definisikan Konten dan Nada Kontranarasi

Tahap ini tergantung pada target kontranarasi. Kita perlu lihat terlebih dahulu bagaimana konten dan nada narasi kebencian yang mereka buat berdasarkan kajian yang dilakukan pada tahap identifikasi narasi kebencian. Perhatikan bahasa yang digunakan dan sesuaikan dengan kelompok target. Hindari istilah akademik jika targetnya anak muda. Nada narasi kebencian juga sangat penting untuk dipikirkan jika kita ingin menarik perhatian khalayak.

Langkah 4: Pastikan Penggunaan Pendekatan Kebangsaan

Menggunakan nilai dan pendekatan kebangsaan merupakan langkah kunci untuk memastikan bahwa kita tidak menggunakan kembali pola pikir kebencian dalam kontranarasi

yang kita buat. Kontranarasi harus secara eksplisit menyebutkan aspek keberagaman dalam satu bangsa dan bagaimana narasi kebencian melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Langkah 5: Pilih Media

Perkembangan teknologi memperbesar cakupan media saat ini. Banyak media, arus utama maupun independen, yang memiliki lebih dari satu platform media sehingga sulit mendefinisikan dan mengategorikan media dalam satu pengertian saja. Kita bisa melihat apa yang ada di TV dan koran seperti yang kita dapatkan di internet. Secara sederhana dan luas, media dapat dikategorikan menjadi: media arus utama (televisi, radio, dan koran), media berbasis internet (media sosial, *website*, radio dan koran *online*), serta media luring atau *offline* (mural, poster, *flyer*, dan brosur). Setiap media memiliki audiensnya masing-masing dengan segmen yang berbeda pula. Dalam tahap ini pemilihan media bukan hanya mempertimbangkan media mana yang paling mudah menjangkau target tetapi juga media yang paling tepat cara untuk mendistribusikan produk kontranarasi.

Langkah 6: Buat Rencana Aksi

Tahap ini adalah langkah terakhir dari fase ini. Tahap ini menggabungkan seluruh langkah yang ada dalam fase ini dan membantu kita untuk menentukan langkah selanjutnya. Rencana aksi dapat dilakukan dalam jangka pendek (satu hingga enam bulan) atau jangka panjang (satu hingga lima tahun). Pada tahap ini penting untuk mengulas kembali tujuan, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika mengembangkan rencana aksi, pastikan bahwa rencana dilakukan seakurat mungkin. Selalu berikan tenggat waktu dan orang yang bertanggung jawab untuk setiap langkah. Pastikan rencana aksi ini diketahui seluruh anggota tim, terutama yang berhubungan langsung dengan rencana ini.

Strategi Penyebaran Kontranarasi dan Narasi Alternatif

Langkah selanjutnya adalah mengujicoba kontranarasi dan rencana aksi yang sudah dipersiapkan. Pada tahap ini, kita akan berhubungan langsung dengan narasi kebencian dan mulai melawannya. Banyak aksi yang dapat dilakukan, tergantung dengan strategi yang sudah disepakati bersama.

Langkah 1: Rencanakan Momen dan Waktu Peluncuran Kontranarasi

Tahap ini adalah awal untuk memperkenalkan kontranarasi ke publik. Perlu dipastikan momen dan waktu yang tepat supaya semakin banyak audiens dan media yang tertarik dengan kontranarasi yang dibuat. Beberapa hal yang bisa dilakukan

dalam langkah ini adalah: tentukan tanggal peluncuran, cari momentum yang pas, buat peluncuran yang menarik, buat supaya publik mengantisipasi peluncuran ini, buat komitmen dari awal, gunakan bahasa yang sesuai dengan audiens, dan ajak orang dengan berbagai latar belakang supaya semakin menarik perhatian dan memperluas cakupan kontranarasi.

Langkah 2: Ajak Banyak Media untuk Terlibat

Pengikutsertaan media seharusnya sudah dilakukan sepanjang proses pembuatan kontranarasi ini. Media adalah kendaraan yang memungkinkan kita memiliki ruang lebih untuk menyampaikan kontranarasi dan mendistribusikannya ke berbagai audiens. Dengan demikian, jangkauan yang efisien dan lebih luas dapat terlaksana. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam memilih suatu media, disesuaikan dengan tujuan dan target dari kontranarasi itu sendiri. Jangan meremehkan peran media-media kecil, seperti koran dan radio komunitas, TV lokal, majalah mahasiswa, dsb. Terkadang platform ini lebih efektif untuk mencapai target di level komunitas.

Langkah 3: Ajak Orang-Orang Berpengaruh

Orang-orang berpengaruh dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan memengaruhi para pengikutnya untuk terlibat. Mereka bisa datang dari beragam latar belakang, politisi, akademisi, atlet, pemusik, dsb. Mereka memiliki jumlah pengikut yang banyak sehingga memungkinkan untuk mendapat audiens banyak dalam waktu singkat. Tentu perlu diperhatikan pula orang-orang yang dapat merepresentasikan topik kontranarasi kita, misalnya mereka yang memang memiliki perhatian khusus terhadap isu yang kita bahas. Pastikan kita tidak memilih orang-orang yang justru pernah mendukung narasi kebencian.

Langkah 4: Ikutsertakan Semua Pihak yang Terlibat

Ingat bahwa dibalik narasi kebencian yang disebar, ada unsur

manusia yang terlibat di dalamnya. Mengajak orang dari kedua kelompok memang menjadi tantangan tersendiri, tetapi aksi ini perlu dilakukan untuk menjangkau lebih banyak orang. Hal ini juga dapat membuka dialog dari kedua pihak. Untuk itu, selain perlu pemilihan yang sangat hati-hati, perhatikan pula tujuan dari kontranarasi ini. Pastikan konten yang disebar tidak ambigu. Pertimbangkan apakah orang lain dapat menyalahgunakan informasi yang Anda sebarkan untuk memberikan gambaran yang salah dan membahayakan orang lain. Ingat bahwa konten yang disebar, baik *online* maupun *offline*, mudah disalahpahami dan menyebabkan adanya ketersinggungan jika tidak dibahasakan dengan baik. Jangan menyebarkan hal apapun yang dapat mengganggu privasi dan keamanan orang lain. Periksa kembali jika Anda kurang yakin.

Ujaran Kebencian di Ranah Daring (Online)

Penjelasan di atas sebenarnya berlaku umum yang bisa dilakukan dalam *setting offline* maupun *online*. Anda bisa menggunakan pengetahuan di atas untuk membantu pekerjaan Anda di ranah *offline*, seperti ceramah, diskusi, dan silaturahmi. Tidak bisa dimungkiri, hoaks dan ujaran kebencian paling banyak beredar di ranah *online*, baik melalui media sosial seperti (Facebook, Twitter, Instagram, dsb) atau aplikasi pesan instant (seperti WhatsApp, Telegram, dan Line). Perlu cara dan pendekatan yang khusus pula untuk melakukan kampanye di ranah online. Beberapa hal ini yang perlu dipahami terkait dunia online dibandingkan *offline* adalah.

- *Internet tidak memiliki lokasi yuridis tertentu* sehingga mempersulit proses penindakan ujaran kebencian di media sosial. Dalam banyak kasus, ujaran kebencian yang ditujukan pada seseorang di Jakarta ternyata dilakukan oleh orang dari provinsi bahkan negara lain. Hal ini berdampak pada proses penegakan hukum yang memerlukan usaha lebih untuk menyelesaikan perkara ini.

- *Sulitnya mengontrol perilaku orang dalam dunia siber.* Interaksi di internet tercipta karena pengguna-penggunanya sendiri. Model seperti ini sulit untuk dipantau pihak luar dan pemerintah. Meskipun memungkinkan untuk memblokir situs atau bahkan menghapus konten tertentu, sangat mudah pula untuk membuat situs dan konten baru atau meluncurkan ulang ujaran kebencian yang sama. Di sisi lain, upaya untuk mengontrol internet juga kontroversial karena bagaimanapun semua orang merasakan kemudahan-kemudahan yang diberikan internet. Mengontrol dan memonitor internet memengaruhi kebebasan orang dalam menggunakan internet.

- Hukum pasar juga berlaku dalam penyediaan konten di ranah *online*. Hal yang kontroversial, termasuk yang mengandung ujaran kebencian, banyak disukai orang dan mendatangkan keuntungan bagi penyedia ujaran kebencian. Sejauh ini penyedia media online seperti Facebook, Twitter, dan YouTube memiliki aturan terkait ujaran kebencian yang sedikit banyak berpengaruh pada beredarnya ujaran kebencian di platform-platform tersebut

Setiap platform sosial media memiliki fitur unik yang bisa dimanfaatkan untuk media kontranarasi. Contohnya Facebook yang memungkinkan kita untuk meluncurkan berbagai media dalam satu kali posting, baik teks, foto, dokumen, surel, video, juga perasaan yang kita alami saat itu. Fitur-fitur ini dapat dimanfaatkan untuk membuat kontranarasi yang paling menarik dan paling informatif, misalnya dengan pantun, puisi, lagu, atau melampirkan hasil kajian dari lembaga yang terpercaya sebagai bentuk kontranarasi. *WhatsApp* juga memiliki fitur yang kurang lebih sama dengan *Facebook*. Bedanya, karena *WhatsApp* adalah aplikasi untuk pesan instan, perputarannya bisa jadi lebih cepat daripada Facebook. Apalagi jika kontranarasi disebarkan di grup dengan banyak anggota.

Selain fitur, target audience juga bisa ditentukan dari media sosialnya. Untuk Facebook dan *WhatsApp* di Indonesia, penggunanya berasal dari berbagai kalangan dan kelompok usia. Berbeda dengan Instagram dan Line yang lebih popular di kalangan anak muda. Mengenali karakter, fitur, dan popularitas di kalangan pengguna akan membuat penyebaran narasi perdamaian lebih efisien.

Satu hal yang terdapat pada berbagai media sosial maupun aplikasi pesan instan, adalah penggunaan hashtag (#). Seringkali kita melihat pesan ditonjolkan dalam beberapa kata yang menarik dan mudah diingat. Tagar berperan sebagai 'kategori' dan seringkali dituliskan bersamaan dengan posting lain, sebagai penanda bahwa posting tersebut masih berhubungan dengan tagar tersebut sehingga memudahkan pencarian. Fungsi ini bisa ditemukan di berbagai media sosial dan terbukti efektif untuk mengampanyekan berbagai pesan, baik yang positif maupun negatif. Contoh tagar yang sempat populer adalah: #KamiTidakTakut, #PrayForLombok, atau #LawanHoax

Penutup

Sebagaimana tampak pada bab-bab terdahulu, modul ini memuat materi yang berorientasi wawasan dan keterampilan dalam menangkal konflik kekerasan, intoleransi, dan ekstremisme kekerasan. Materi tersebut akan didiskusikan dalam dua hari lokakarya bersama penyuluh agama di Indonesia. Kami berharap, materi tersebut tidak berhenti di lokakarya, melainkan ditularkan di dalam pembicaraan, formal maupun non formal, di tempat mereka bekerja. Dengan begitu, konflik kekerasan, tindakan intoleransi, dan ekstremisme kekerasan segera teridentifikasi dan teratasi secara nirkekerasan.

Modal pertama yang diperlukan untuk menghalau konflik kekerasan dan ekstremisme kekerasan adalah wawasan tentang agama, negara-bangsa, dan nasionalisme di Indonesia. Indonesia adalah negara besar yang sampai sekarang bertahan di bawah pemerintahan demokratis walaupun begitu banyak perbedaan penduduknya dari sisi suku, ras, dan agama. Dalam pembentukannya, sebagaimana tampak pada Bab I, tokoh-tokoh dari berbagai agama menyumbangkan gagasan, ide, dan landasan yang menunjang nasionalisme dan pembangunan-bangsa.

Modal lainnya adalah bahwa agama pada dirinya memang telah menyediakan landasan yang memadai bagi nirkekerasan dan binadamai. Berbeda dari reaksi terhadap kekerasan, termasuk yang dilakukan kelompok ekstremis, landasan

tersebut berorientasi pada perubahan. Nirkekerasan dan binadamai tidak bermakna pasif, menerima apa saja yang ada, melainkan aktif menyuarakan keadilan dan kebenaran dengan jalan tanpa kekerasan. Landasan ini sangat penting mengingat wajah Indonesia agak ternoda oleh aksi dan tindakan terorisme. Selain itu, peta Indonesia juga memperlihatkan titik-titik merah yang disumbang oleh aksi protes yang diakhiri dengan kekerasan. Ruang-ruang dialog dan mediasi yang disediakan demokrasi seyogyanya dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk penyuluh agama, untuk menangkal kekerasan sedari dini.

Itulah sebabnya, modul ini menyediakan materi yang lebih praktis: yakni sebagai alat analisis konflik dan perangkat untuk kontra narasi rumor, hoaks, dan ujaran kebencian di masyarakat. Melalui analisis konflik, para penerima manfaat modul ini diharapkan bisa menyediakan gambaran yang utuh dan jernih perihal apa, siapa, dan kepentingan di balik para aktor yang berseteru di wilayahnya. Data tersebut bisa digunakan aparat atau pihak ketiga lainnya yang bekerja untuk mengatasinya secara nirkekerasan. Keterampilan lain yang kami anggap penting adalah mengenali dan mengatasi hoaks, rumor, dan ujaran kebencian yang memecah belah masyarakat. Setelah mengenali, bab terakhir menyediakan langkah-langkah praktis menghalaunya melalui konter wacana di media sosial.

Meski penerima manfaatnya adalah penyuluh agama, modul ini diharapkan bisa dibaca lebih banyak pihak dengan harapan ide dan gagasan penanggulangan dan pencegahan kekerasan, baik yang dipicu masalah sosial maupun ekstremisme menular ke sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya kalangan di Indonesia.***

Daftar Pustaka

Ahnaf, M. Iqbal (Ed.). 2014. *Politik Lokal dan Konflik Keagamaan.* (Yogyakarta: CRCS UGM)

Ali-Fauzi, Ihsan, Rudi Harisyah Alam dan Samsurizal Panggabean (2009), *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia* (1990-2008), Yayasan Wakaf Paramadina (YWP), Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), The Asia Foundation (TAF), Jakarta.

Article 19. 2015. *'Hate Speech' Explained: A Toolkit*. Article 19, London.

Barron, Patrick, Sana Jaffrey, dan Ashutosh Varshney (2014), *How Large Conflicts Subside: Evidence from Indonesia* (Indonesian Social Development Paper no. 18), The World Bank.

Chenoweth, Erica, dan Maria J. Stephan, *Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict* (New York: Columbia University Press, 2011).

Del Felice, C dan Ettema, M. 2018. *We Can! Taking Action against Hate Speech through Counter and Alternatif Narratives*. Council of Europe, Strasbourg.

Effendi, Bahtiar. 2009. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Paramadina.

Fealy, Greg & White, Sally (eds.). 2008. *Expressing Islam: Islamic Life and Politics in Indonesia,* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Fisher, Simon, et al., *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action* (London: Zed Books Ltd., 2000).

Galtung, Johan "Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peace-making, and Peacebuilding," dalam Johan Galtung, *Peace, War and Defence: Essays in Peace Research*, (vol. II), (Copen-hagen: Christian Ejlers, 1976).

Galtung, Johan, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Devel-opment and Civilization* (Oslo: PRIO; London: SAGE, 1996).

George, Cherian. 2017. Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersing-gungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi. PUSAD Paramadina, Jakarta.

Gomes, R. (ed.). 2013. *Bookmarks: A Manual for Combating Hate Speech Online through Human Rights Education*. Council of Europe, Strasbourg.

Hamid, Sandra. 2018. *Normalising Intolerance: Elections, Religion and Everyday Life in Indonesia*. CILIS Policy Paper.

Hasan, Noorhaidi, ed. 2018. *Literatur Keislaman Generasi Milenial.* UIN Sunan Kalijaga Press.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. t.t. *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*.

Mietzner, Marcus dan Muhtadi, Burhanuddin dan Halida, Rizka. 2018. "Entrepreneurs of Grievance Drivers and Effects of Indone-sia's Islamist Mobilization." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 174 (2018), 159–187.

Mietzner, Marcus dan Muhtadi, Burhanuddin. 2018. "Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intoler-ance, Militant Groups and the Politics of Accommodation." *Asian Studies Review*. 42–3.

Miqdad, Mohammad (2014), “Intervensi Perdamaian dalam Konflik Agama: Advokasi dan Fasilitasi”, dalam Zainal Abidin Bagir. Ed., *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi*, Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada, 25-48.

Ngelow, Zakaria J. 1996. *Kekristenan dan Nasionalisme: Perjumpaan umat Kristen Protestan dengan Pergerakan Nasional Indonesia, 1900-1950*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

PPIM UIN Jakarta. 2018. *Api dalam Sekam – Keberagamaan Generasi Z.* PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia.

Satha-Anand, Chaiwat, “Towards a Peace Culture in Asia,” dalam UNESCO, *Peace and Conflict Issues after the Cold War: Unesco Studies on Peace and Conflict* (Paris: UNESCO, 1992), hal. 135-159.

---------, *“Barangsiapa Memelihara Kehidupan…”: Esai-esai tentang Nirkekerasan dan Kewajiban Islam* (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2015).

Schock, Kurt, “Introduction,” dalam Kurt Schock (ed.), *Civil Resistance: Comparative Perspectives on Nonviolent Struggle* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015).

Sharp, Gene, *Waging Nonviolent Struggle: 20th Century Practice and 21st Century Potential* (Boston: Extending Horizon Books, 2005).

Smith-Hefner, Nancy. 2011. “Javanese Women and the Veil”, in Kathleen M. Adams and Kathleen A. Gillogly, eds., *Everyday life in Southeast Asia*,Indiana University Press, 154-164.

Menggapai Kerukunan Umat Beragama

Tim Penyusun: Ihsan Ali-Fauzi, Zainal Abidin Bagir, Dyah Ayu Kartika, Irsyad Rafsadie
Penerbit: PUSAD Paramadina
Tahun: 2018
Jumlah Halaman: vii+67 halaman
ISBN: 978-602-52519-0-0

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dibentuk dengan harapan dapat menjadi lembaga yang terdepan dalam menengahi persoalan antar-umat beragama dan merawat kerukunan di Indonesia. Namun demikian, banyak pihak masih menyangsikan kapasitas FKUB dalam mengelola kerukunan, terlebih merangkul kelompok agama yang rentan.

Bertolak dari pertimbangan tersebut, buku panduan ini dipersiapkan untuk ikut memperkokoh peran FKUB dalam menyelesaikan konflik dan memperkuat kerukunan. Disadari bahwa konteks dan tantangan yang dihadapi FKUB di berbagai daerah sangat beragam.

Karena itu, buku panduan ini dirancang agar tidak terlalu teknis, melainkan lebih menekankan wawasan umum dan paradigma mengenai kerukunan, manajemen konflik dan mediasi. Meski diberi judul "Buku Saku FKUB", panduan ini juga diharapkan dapat berguna bagi pemimpin agama, pemimpin masyarakat dan praktisi pada umumnya yang selama ini terlibat dalam penyelesaian konflik berlatar-belakang agama.***

Keluar dari Ekstremisme: Delapan Kisah "Hijrah" dari Kekerasan Menuju Binadamai

Penulis: Ali Nur Sahid, Fini Rubianti, Husni Mubarok, Sri Lestari Wahyuningroem, Zainal Abidin Bagir, Irsyad Rafsadie, Jacky Manuputty
Editor: Ihsan Ali-Fauzi & Dyah Ayu Kartika
Penerbit: PUSAD Paramadina
Tahun: 2018
ISBN 978-979-772-059-9

Sudah cukup banyak riset dilakukan tentang bagaimana orang menjadi ekstremis (radikal, bahkan teroris) di Indonesia, tapi masih sangat jarang riset dibuat tentang proses kebalikannya: bagaimana dan mengapa orang berhenti dari menjadi ekstremis. Inilah proses yang disebut "transformasi personal" atau "hijrah" dari kekerasan (ekstremis) menuju binadamai.

Buku ini ingin mulai mengatasi kelangkaan di atas. Ada delapan orang yang biografi mereka tentang hijrah dihadirkan di sini: Ronald Regang (mantan tentara anak di Maluku); Arifuddin Lako (korban/pelaku konflik kekerasan Poso); Palti Hatoguan Panjaitan (korban/pegiat kebebasan beragama); Chairun Nisah (pelaku konflik separatis Aceh); Baihajar Tualeka (korban/pelaku konflik Ambon); Imam Aziz (kyai dan aktivis rekonsiliasi NU dan korban terkait peristiwa 1965); Mery Kolimon (pendeta dan pegiat rekonsiliasi gereja dan korban terkait 1965); dan Jacky Manuputty (korban/pelaku konflik kekerasan Maluku dan pegiat binadamai).

Buku ini penting dibaca tiap warganegara yang peduli pada perdamaian. Lebih khusus, buku ini wajib dibaca para pengambil kebijakan, pekerja pembangunan, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ingin belajar dari pengalaman tokoh-tokoh yang sudah hijrah dari kegelapan kekerasan menuju terang binadamai.***

Ketika Agama Bawa Damai Bukan Perang: “Belajar dari Imam dan Pastor”

Editor: Ihsan Ali-Fauzi
Penerbit: PUSAD Paramadina
Tahun: 2017
Halaman: iv + 237 halaman
ISBN: 9-789-797-720-575
PDF: http://www.paramadina-pusad. or.id/pustaka/ketika-agama-bawa-damai-bu-kan-perang

Agama sering menjadi sumber aksi-aksi kekerasan, tapi agama juga bisa menjadi sumber upaya-upaya binadamai. Kita sering terpaku pada yang pertama, kurang sekali melaporkan dan mempelajari yang kedua. Kita sudah tidak adil sejak dalam pikiran: kita mau agama menyebarkan kasih, tapi yang kita perhatikan melulu agama yang membawa perang.

Dua pengaruh agama di atas dialami Imam Muhammad Ashafa dan Pastor James Wuye dari Nigeria. Mereka contoh hidup pemimpin agama yang hijrah dari mendukung aksi-aksi kekerasan menjadi pengecamnya. Kisah mereka didokumentasikan dalam film The Imam and The Pastor (2006), yang banyak dipuji dan sekaligus mempopulerkan mereka sebagai “Imam dan Pastor”.

Buku ini, yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan keduanya di Indonesia, dimaksudkan untuk memperkenalkan dan meramaikan wacana agama dan perdamaian seperti diwakili “Imam dan Pastor”. Beberapa kasus agama dan binadamai dari Tanah Air juga diangkat untuk memperkuat wacana ini lebih lanjut. Indonesia mungkin lebih baik secara umum dari Nigeria. Tapi hidup Imam Ashafa dan Pastor James, yang kebetulan orang Nigeria, mengandung banyak hal yang patut kita pelajari dan teladani.

Buku ini penting dibaca oleh para pengambil kebijakan, pekerja pembangunan dan hak-hak asasi manusia, dan para aktivis pluralisme yang mendambakan hubungan yang harmonis di antara berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia.***

Agama Menggerakkan Perdamaian

Penulis: Staf dan mahasiswa CRCS & IIS UGM
Penerbit: CRCS UGM
Tahun: 2017
Halaman: iv + 80 halaman
PDF: https://crcs.ugm.ac.id/news/11872/kompilasi-catatan-dari-lokakarya-mediasi-antariman.html

Narasi bahwa agama merupakan sumber konflik telah banyak menyebar dan dipercaya begitu saja oleh banyak orang. Konflik yang melibatkan orang-orang beragama, dengan aksentuasi terhadap agama sebagai penanda identitas utama dalam konflik itu, kerap memenuhi kepala berita media massa. Namun agama sebagai sumber perdamaian jauh lebih jarang diliput. Padahal yang terakhir ini sama pentingnya dari yang pertama. Dalam hal ini, mengikuti Ihsan Ali-Fauzi, kita tidak adil dalam pikiran: konflik berbalut agama kerap dikaji, namun bagaimana agama di sisi lain juga mampu mendorong perdamaian kurang dipelajari.

Bermula dari kehendak untuk mendalami agama sebagai penggerak perdamaian itulah kuliah umum dan Lokakarya Mediasi Antariman bersama Imam Muhammad Ashafa, Pastor James Wuye, Maria Ida Giguiento, dan Jacky Manuputty digelar di Universitas Gadjah Mada pada 10-13 Oktober 2017. Acara ini diselenggarakan atas kerja sama Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Lembaga Antar-Iman Maluku, Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) UGM, Institute of International Studies (IIS) UGM, Tanenbaum Foundation, dan Yayasan Tifa.

Mahasiswa CRCS dan staf IIS UGM telah menulis catatan dari kuliah umum dan lokakarya itu, sebagai liputan agar hal-hal yang dibicarakan di acara itu dapat lebih tersebar ke khalayak ramai. Catatan-catatan itu telah diunggah secara terpisah di web CRCS. Agar lebih mudah dibaca, kini catatan-catatan itu telah dikumpulkan dalam buku ini.***

Nirkekerasan dan Bina-Damai dalam Islam: Teori dan Praktik
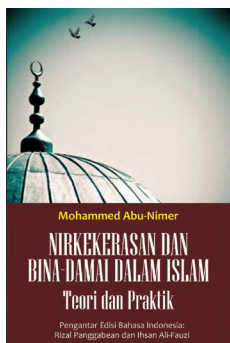
Penulis: Mohammed Abu Nimer
Editor: Rizal Panggabean & Ihsan Ali-Fauzi
Penerjemah: Irsyad Rafsadie & Khairil Azhar
Tahun: 2010
Halaman: xxxiii + 306 halaman
ISBN: 978-979-3064-92-5
PDF: http://www.paramadina-pusad.or.id/pustaka/nirkekerasan

Buku karya Abu-Nimer, seorang sarjana, dosen dan instruktur resolusi konflik Muslim, ini membahas satu tema yang jarang sekali dikupas secara mendalam, yaitu nirkekerasan (nonviolence) dan bina-damai (peace building) dalam agama, tradisi dan kebudayaan Islam. Sesudah membahas secara mendalam berbagai studi dalam tema ini, Abu-Nimer menunjukkan bukti-bukti kuat mengenai tersedianya berbagai prinsip dan nilai dalam Al-Qur'an, Hadis dan tradisi Islam yang mendukung penerapan strategi bina-damai dan nirkekerasan dalam penyelesaian sengketa. Dia juga mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi ketika kita hendak menerapkan strategi-strategi nirkekerasan dan bina-damai itu dalam konteks Islam, baik pada tingkat lokal maupun global.

Sejalan dengan kedalaman studi, kekayaan pengalaman dan reputasi internasional penulisnya, buku ini mengombinasikan teori-teori perdamaian serta resolusi konflik dan penerapan praktisnya dalam berbagai prakarsa bina-damai, resolusi konflik, dan nirkekerasan di sejumlah komunitas Muslim—dulu dan sekarang. Lewat buku ini, Abu-Nimer menawarkan sebuah kerangka untuk pengembangan lebih lanjut dan pemanfaatan lebih jauh prinsip-prinsip bina-damai dan nirkekerasan dalam konteks Islam..***

Di antara pihak yang mengemban tugas dan tanggungjawab untuk turut mengawasi dan mengatasi intoleransi dan ekstremisme adalah penyuluh agama. Peran penyuluh agama strategis karena selama ini mereka bekerja di tingkat paling bawah, desa/kelurahan, menjangkau majelis-majelis taklim, perkumpulan, dan komunitas agama di masyarakat. Modal ini tentunya penting dalam upaya menyebarkan model usaha binadamai dan nirkekerasan di masyarakat.

Buku ini adalah upaya memperkaya literasi agama tentang binadamai. Memperkuat aspek pengetahuan dengan membahas sumbangsih agama dalam pembentukan nasionalisme, mendiskusikan peran agama dalam binadamai, memetakan intoleransi dan ekstremisme keagamaan yang berkembang saat ini. Selain itu, buku ini juga mengulas pengetahuan praktis tetang bagaimana menganalisis ketegangan dan konflik di masyarakat, sekaligus bagaimana mengembangkan narasi alternatif dan langkah-langkah praktis untuk melakukan kontra narasi terhadap hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.

Modul ini pada mulanya adalah “buku saku” bagi penyuluh agama. Meski demikian, panduan ini sengaja disusun sebisa mungkin juga diambil manfaat oleh masyarakat lebih luas yang selama ini terlibat dalam membangun kerukunan dan binadamai di Indonesia.